



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

PROVINSI PAPUA

TAHUN 2019 - 2023

BAPPEDA PROVINSI PAPUA  
Kantor Gubernur Papua  
Jl. Soa Siu Dok II  
Kota Jayapura  
Papua

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	1
1.3. Maksud dan Tujuan .....	2
1.4. Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II GAMBAR PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	5
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Bappeda .....	5
2.2. Sumber Daya Bappeda .....	12
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	16
2.4. Tantangann dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.....	19
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PERNGAKAT</b> .....	21
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda .....	21
3.2. Telaahan Visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	23
3.3. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda provinsi Papua.....	26
3.4. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	29
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	31
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	33
4.1. Tujuan Jangka Menengah Bappeda Provinsi Papua .....	33
4.2. Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Papua.....	33
<b>BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	35
<b>BAB Vi RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN....</b>	38
5.1. Rencana Program dan Kegiatan .....	38
5.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator .	42
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	79
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	81

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional OPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber- sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi OPD. Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan

### **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Papua Tahun 2018-2023 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Bappeda Provinsi Papua dalam melaksanakan tugas dan fungsi terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian
2. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatajan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada

penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan

3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan OPD lingkungan Pemerintah Papua terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan

Tujuan dari penyusunan dokumen Renstra Bappeda Provinsi Papua adalah

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur kedalam tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2018-2023, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD;
2. Menjabarkan gambar tentang kondisi umum perangkat daerah;
3. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Provinsi Papua Tahun 2018 - 2023.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (RENSTRA BAPPEDA Provinsi Papua Tahun 2018-2023 disusun melalui sistematika sebagai berikut.

- Bab I. Pendahuluan,** menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- BAB II. Gambaran Pelayanan** BAPPEDA Provinsi Papua, menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BAPPEDA Provinsi Papua
- BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis** BAPPEDA Provinsi Papua mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BAPPEDA Provinsi Papua, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua telaahan RENSTRA Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan RENSTRA BAPPEDA kabupaten/kota di Provinsi Papua serta penentuan isu-isu strategis BAPPEDA Provinsi Papua
- BAB IV. Tujuan dan Sasaran,** berisi tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPEDA Provinsi Papua
- BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan,** berisi strategi dan arah kebijakan BAPPEDA Provinsi Papua dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan,** mengemukakan rencana

program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,** mengemukakan indikator kinerja BAPPEDA Provinsi Papua yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Papua 2018-2023

**BAB VIII. Penutup,** berisi ringkasan RENSTRA serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan RENSTRA BAPPEDA Provinsi Papua Tahun 2018-2023

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Sesuai dengan Perda No.13 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Program
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - a. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3. Bidang Perekonomian, membawahi :
  - a. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, ESDM, Perikanan dan Kelautan
  - b. Sub Bidang Perindustria, Perdagangan dan Pariwisata
  - c. Sub Bidang Dunia Usaha Investasi dan Lembaga Keuangan
4. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
  - a. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga dan Pemuda
  - b. Sub Bidang Kesehatan, Sosial dan Kependudukan
  - c. Sub Bidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus
5. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi :
  - a. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan
  - b. Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi
  - c. Sub Bidang Bina Marga dan Cipta Karya

6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, membawahi :
  - a. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
  - b. Sub Bidang Pengendalian Administrasi Program
  - c. Sub Bidang Pelaporan dan Pembangunan
7. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan, membawahi :
  - a. Sub Bidang Perencanaan Kawasan
  - b. Sub Bidang Pengembangan Kawasan
  - c. Sub Bidang Kawasan Strategi dan Khusus
8. Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB); dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Bagian, dan kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan Gubernur.

#### 1. Kepala Badan

Untuk melaksanakan tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai Fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah
- Pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah ; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat

### Tugas Pokok :

Mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan perlengkapan

### Fungsi :

- Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan
- Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu.
- Penetapan rumusan kebijakan penyusunan rencana strategis Badan.
- Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi Badan.
- Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan.
- Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.
- Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan.
- Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas badan.
- Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan.
- Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas badan.
- Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

#### a. Sub Bagian Penyusunan Program;

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program

Badan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan.
- Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan.
- Pelaksanaan Penyusunan rencana strategis Badan.
- Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas.
- Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pemerintah daerah (RKPD) Badan.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain lingkungan Badan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan ketatausahaan (surat menyurat/naskah dinas, rumah tangga, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian serta urusan umum lainnya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- Melakukan penyusunan program kerja dan rencana operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
- Melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan (surat menyurat/naskah dinas);
- Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan kehumasan Badan;
- Melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Badan;
- Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya

c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Badan.
- Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan.
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja.
- Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai negeri sipil.
- Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan.
- Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan.
- Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan.
- Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja.
- Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan.
- Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan.
- Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

### 3. Bidang Perekonomian

Bidang perekonomian mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan pembangunan dibidang perekonomian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bidang Perekonomian mempunyai fungsi

- Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, bidang kehutanan, bidang energy dan sumberdaya mineral, bidang perikanan dan kelautan, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang pariwisata, bidang investasi dan bidang keuangan;
- Mengkoordinasikan perencanaan strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan
- Pembinaan teknis substantive penyusunan strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, bidang kehutanan, bidang energy dan sumberdaya mineral, bidang perikanan dan kelautan, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang pariwisata, bidang investasi dan bidang keuangan;
- Mengkoordinasikan perencanaan strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan
- Pembinaan teknis substantive penyusunan strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
- Pengkoordinasian, pengendalian kesesuaian antar indicator kinerja program dengan tolak ukur kinerja out put dan/ hasil kegiatan pada Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
- Pengkoordinasian pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja bidang perekonomian serta penentuan peringkat badan;
- Pengkoordinasian penghitungan rencana alokasi anggaran badan;
- Pengkoordinasian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- Pengkoordinasian penyusunan Penyelenggaraan penataan ruang, Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi dan
- Penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang ekonomi

Bidang perekonomian membawahi 3 (tiga) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber daya Mineral, Perikanan dan Kelautan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata dan Dunia usaha, Investasi dan Lembaga Keuangan, masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### 4. Bidang Sosial Budaya

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya

Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- Pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kebudayaan, olahraga dan pemuda, kesehatan, sosial dan kependudukan serta pemerintahan, dan otonomi khusus
- Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) badan;
- Pembinaan teknis substantive penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) badan;;
- Pengkoordinasian dan pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/hasil kegiatan pada rencana kerja (Renja dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) badan;
- Pengkoordinasian pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja bidang sosial budaya serta penentuan peringkat badan;
- Penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang sosial budaya
- Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

Bidang sosial budaya membawahi 3 (tiga) sub bidang Pendidikan, kebudayaan, olahraga dan pemuda; Kesehatan, Sosial dan Kependudukan; dan Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kerjasama Mitra Pembangunan. Masing-masing sub bidang dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang

## 5. Bidang Fisik dan Prasarana

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai Tugas mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di bidang fisik dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, pengairan, perhubungan, telekomunikasi, bina marga dan cipta karya.
- Pengkoordinasian penyusunan Rencana strategis (Renstra), Rencana kerja (Renja), dan rencana kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
- Pembinaan teknis substansif Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
- Mengkoordinasikan pengendalian kesesuaian antara indicator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan /atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan;
- Pengkoordinasian pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja bidang social budaya serta penentuan peringkat Badan;
- Pengkoordinasi penyusunan Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Pengkordinasian penyusunan penyelenggaraan penataan ruang, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
- Penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Fisik dan Prasarana.

Bidang Fisik dan Prasarana membawahi tiga sub bidang yaitu Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Pengairan, dan Sub bidang perhubungan, Telekomunikasi, Bina Marga, dan Ciptakarya.

## 6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Bidang Pengendalian mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan pengendalian administrasi perencanaan dan membuat laporan.

- Menyusun rencana kegiatan, melaksanakan pengendalian administrasi program.
- Menyusun rencana kegiatan, melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.
- Menyusun rencana kegiatan, melaksanakan pelaporan.
- Melaksanakan kegiatan lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi membawahi tiga sub bidang sub bidang yaitu Sub Bidang Pengendalian Administrasi Program, Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi dan Sub Bidang Pelaporan Pembangunan

#### 7. Bidang Pengembangan Wilayah Dan Tata Ruang

Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang mempunyai tugas, melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah lingkup Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang meliputi pengembangan wilayah, Tata Ruang, Kawasan Strategis dan Kawasan Khusus.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang pengembangan wilayah dan tata ruang, mempunyai fungsi:

- pelaksanaan inventarisasi permasalahan lingkup Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang meliputi pengembangan wilayah, Tata Ruang, Kawasan Strategis dan Kawasan Khusus;
- Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan lingkup Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang meliputi pengembangan wilayah, Tata Ruang, Kawasan Strategis dan Kawasan Khusus;
- pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang meliputi pengembangan wilayah, Tata Ruang, Kawasan Strategis dan Kawasan Khusus;
- pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang meliputi pengembangan wilayah, Tata Ruang, Kawasan Strategis dan Kawasan Khusus;
- pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Pertanian; Sub bidang Pengembangan Wilayah dan Sub bidang Kawasan Strategis dan Kawasan Khusus yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### 8. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. UPTB dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan.

##### a. UPTB – LPSE

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai tugas pokok :

- Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
- Memfasilitasi panitia pengadaan menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
- Memfasilitasi panitia/pejabat pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik; dan
- Memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak lain yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE

Fungsi UPTB – LPSE sebagai berikut :

- Penyusunan program kerja LPSE;
- Penyusunan program kegiatan pengelolaan e-procurement dilingkungan Pemerintah Daerah;
- Pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
- Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna System Pengadaan Secara Elektronik;
- Pelaksanaan pelayanan pelatihan/training kepada panitia/pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa untuk menguasai system e-procurement;
- Pelaksanaan dukungan teknis pengoprasian SPSE;
- Pelaksanaan pelayanan kepada panitia/pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa;
- Pelaksanaan pemberian informasi dan pelayanan konsultasi (helpdesk) yang melayani panitia/pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa yang berkaitan dengan system e-procurement;
- Pelaksanaan penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;

- Pelaksanaan pelaporan kepada PA, KPA, dan PPK apabila ditemukan penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektorat Provinsi Papua;
- Pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan kehumasan dan rumah tangga LPSE;
- Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala LPSE membawahi 1 (satu) Sub Bagian Tata usaha dan 3 (tiga) Seksi terdiri dari Seksi Administrasi Sistem Elektronik; Seksi Registrasi dan Verifikasi dan Seksi Layanan Dukungan. Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT-LPSE.

b. UPTB – Pusdalisbang

Pusat Data dan Analisa Pembangunan Papua mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas teknis badan dibidang pengumpulan, pengolahan dan analisa data pembangunan dan pelayanan informasi pembangunan daerah.

Fungsi Pusat Data dan Analisa Pembangunan Papua, sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengumpulan dan pengolahan data pembangunan serta pelayanan informasi pembangunan daerah.
- Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan analisa data spasial dan aspasial pembangunan daerah serta pelayanan informasi publik.
- Penyelenggaraan penyusunan standar pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.
- Penyelenggaraan pelayanan data dan informasi pembangunan daerah.
- Pengelolaan urusan ketatausahaan.

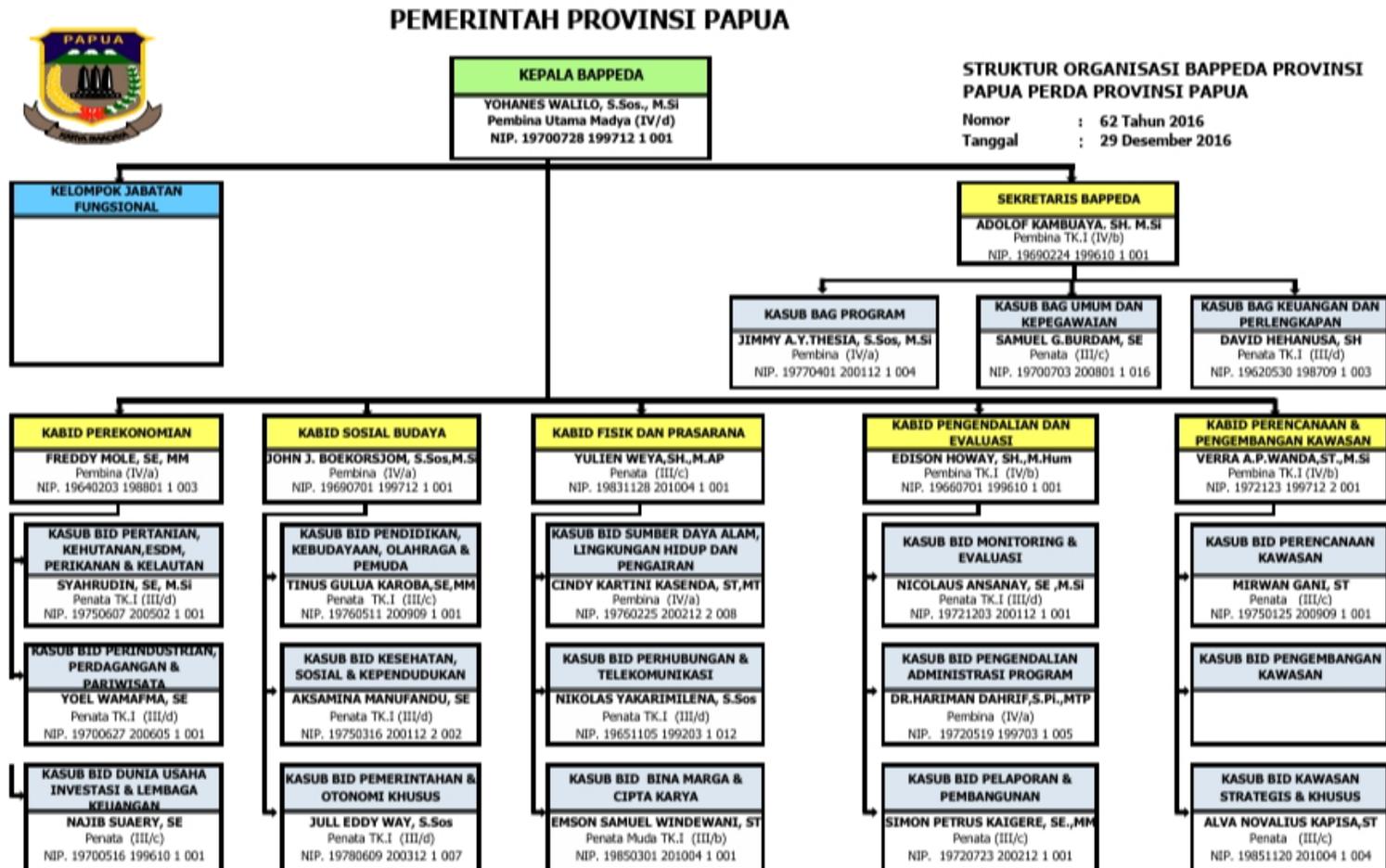
UPTB Data terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha, dan 3 (tiga) Seksi terdiri dari Seksi Pendataan dan Analisa Data; Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi; dan Seksi .....

Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB-Pusdalisbang.

## 9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis pada bidangnya masing-masing pada Bappeda. Kelompok jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga profesional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan

**Gambar 2.1**  
**Struktur Bappeda Provinsi Papua**



## 2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

### 2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda didukung oleh sumber daya manusia dengan kondisi sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Papua Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018**

No	Unit	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala	1	-	1
2.	Sekretariat	26	14	41
3.	Bidang Perekonomian	13	6	19
4.	Bidang Sosial Budaya	13	12	25
5.	Bidang Fisik Prasarana	9	8	17
6.	Bidang Pengendalian dan Evaluasi	13	7	20
7.	Bidang Perencanaan & Pengembangan Kawasan	14	9	23
8.	Kepala UPTB – PUSDALISBANG	7	3	10
9.	Kepala UPTB - LPSE	9	7	16
<b>Jumlah</b>		<b>105</b>	<b>66</b>	<b>171</b>

Sumber : Sub Bagian Umum & Kepegawaian Bappeda Provinsi Papua Tahun 2018

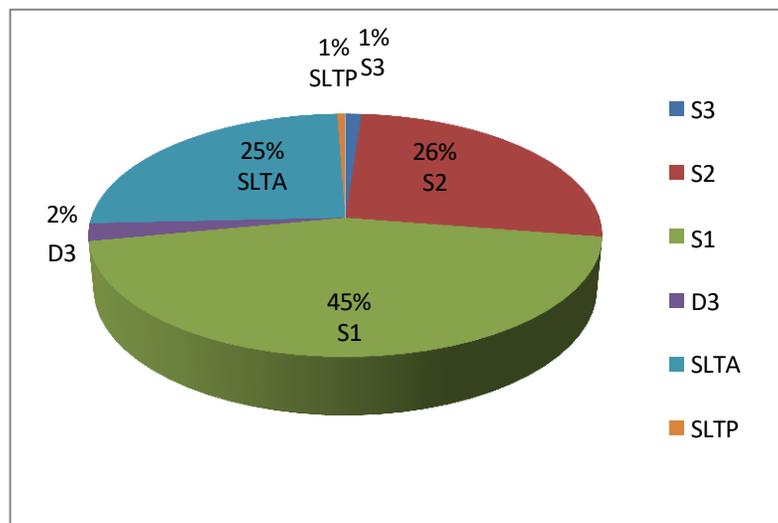
Berdasarkan tabel 2.1 jumlah pegawai Bappeda 171 orang terdiri dari 105 orang laki-laki dan 66 orang perempuan, data ini menunjukkan bahwa 61.40 % pegawai di Bappeda Provinsi Papua adalah Laki-laki

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Papua**  
**Berdasarkan Golongan Pangkat Tahun 2018**

No	Unit	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
1.	Kepala	-	-	1	1
2.	Sekretariat	14	22	2	38
3.	Bidang Perekonomian	1	16	2	19
4.	Bidang Sosial Budaya	5	19	1	25
5.	Bidang Fisik Prasarana	4	13	2	19
6.	Bidang Pengendalian dan Evaluasi	7	10	3	20
7.	Bidang Perencanaan & Pengembangan Kawasan	3	17	3	23
8.	Kepala UPTB Pusedalisbang	4	5	1	10
9.	Kepala UPTB LPSE	5	10	1	16
<b>Jumlah</b>		<b>43</b>	<b>112</b>	<b>16</b>	<b>171</b>

Jumlah pegawai di Bappeda Provinsi Papua sebanyak 171 orang dengan didominasi oleh golongan III sebanyak 112 orang (65,5%) dari keseluruhan pegawai Bappeda, disusul 43 orang (25,1%) golongan II dan 16 orang (9,4%) golongan IV

**Tabel 2.3**  
**Tingkat Pendidikan Pegawai Bappeda Provinsi Papua Tahun 2018**



Mayoritas pegawai Bappeda Provinsi Papua berpendidikan S1 atau 45% dari jumlah pegawai, disusul dengan 26% berpendidikan S2, 25% berpendidikan SLTA, 2% berpendidikan D3, dan 1 % berpendidikan D3 dan SMP

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Papua**  
**Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2018**

No	Unit	Eselon			
		JF	II	III	IV
1.	Kepala	-	1	-	-
2.	Sekretariat	1	-	1	3
3.	Bidang Perekonomian	1	-	1	3
4.	Bidang Sosial Budaya	-	-	1	3
5.	Bidang Fisik Prasarana	-	-	1	3
6.	Bidang Pengendalian dan Evaluasi	1	-	1	3
7.	Bidang Perencanaan & Pengembangan Kawasan	-	-	1	3
8.	Kepala UPTB Pusedalisbang	1	-	1	4
9.	Kepala UPTB LPSE	-	-	1	4
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>26</b>

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Bappeda Provinsi Papua Tahun 2018

Berdasarkan jabatan struktural, Bappeda Provinsi Papua memiliki 1 pejabat struktural eselon II, 8 pejabat eselon III 26 pejabat eselon IV dan 4 Jabatan Fungsional Perencana

### 2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana prasarna perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana di Bappeda Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Kondisi Aset Bappeda Tahun 2018**

<b>No</b>	<b>Jenis Aset</b>	<b>Jumlah Unit</b>	<b>Kondisi Baik (Unit)</b>	<b>Kondisi Rusak (Unit)</b>
1	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)			
2	Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)			
3	Komputer (PC)	19	19	-
4	Laptop			
5	Note Book			
6	Printer			
7	Hardisk			
8	Mainframe Lainnya			
9	Software			
10	Card Wirelaess LAN			
11	Peralatan Jaringan Lainnya			
12	Global Postioning System			
13	Mesin Tik	3	-	3
14	Mesin Hitung Uang	2	2	-
15	Mesin Penghancur Kertas			
16	Mesin Foto Copy	4	-	4
17	Lemari			
18	Meja			
19	Kursi	51	51	-
20	Lemari Es			
21	AC			
22	Sound Sistem			
23	UPS (Unit Power Suply)			
24	Camera			
25	Dispenser	2	2	-
26	TV	4	4	-
27	Brandkas			
28	White Board			
29	Projector			
30	Pesawat Telepone			
31	Wireless Amplifier			
32	Asset Lainnya			

Sumber : Sub Bagian Umum Bappeda Provinsi Papua Tahun 2018

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Papua, serta keselarasan tujuan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2018-2023, maka kinerja pelayanan yang dilaksanakan adalah mengacu pada pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan pada 5 (lima) tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Provinsi Papua**

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target			Target Resntra SKPD Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke -						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
			NSPK	IKK	Indikator Lainnya	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>I</b>	<b>Kinerja</b>																						
<b>A</b>	<b>Indikator Kinerja Kunci (IKK)</b>																						
1	Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	-	-		80	85	85	90	95	100	80	85	85	90	95	100	-	-	-	-	-	-
2	Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	-	-		90	85	85	90	95	100	90	85	85	90	95	100	-	-	-	-	-	-
3	Persentase Ketersediaan data pembangunan daerah	Persen	-	-		85	85	85	90	95	95	85	85	85	90	95	95	-	-	-	-	-	-
4	Meningkatnya Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	-	-		80	80	80	85	90	95	80	80	80	85	90	95	-	-	-	-	-	-
5	Prosentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Perda RTRW	Persen	-	-		-	70	70	75	-	-	-	70	70	75	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persen	-	-		80	80	80	85	85	90	80	80	80	85	85	90	-	-	-	-	-	-

**Tabel 2.6**

**Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Provinsi Papua Tahun 2013 – 2018**

Uraian	Anggaran pada tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Belanja</b>	66,002,165,000		91,450,284,000	86,638,792,760	102,629,077,000	96,016,857,700	59,253,234,951	-	82,617,318,950	77,850,981,880	93,992,322,970	91,270,733,719	89.80%		90.34%	89.86%	91.58%	95.06%
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	16,494,697,000		20,785,556,000	26,423,352,000	29,743,452,000	32,695,308,000	14,976,316,797		20,369,844,880	25,894,884,960	29,148,582,960	32,041,401,840	90.80%		98.00%	98.00%	98.00%	98.00%
<b>Belanja Langsung</b>	49,507,468,000	73,674,696,000	70,664,728,000	60,215,440,760	72,885,625,000	63,321,549,700	44,276,918,154		62,247,474,070	51,956,096,920	64,843,740,010	59,229,331,879	89.40%		88.09%	86.28%	88.97%	93.54%

### 2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan merupakan ancaman dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Bappeda. Sedangkan peluang adalah kesempatan yang datang dari faktor eksternal yang dapat mendukung tercapainya tujuan Bappeda dalam tiga tahun. Dengan memahami tantangan dan peluang di lingkungan strategisnya, diharapkan Bappeda dapat membuat strategi yang tepat demi terwujudnya tujuan pembangunan daerah.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik.

Dengan adanya pemekaran wilayah, maka Provinsi Papua menjadi provinsi induk dari beberapa provinsi pemekaran di wilayah Papua. Hal akan mengakibatkan pergeseran aktivitas ekonomi dari Provinsi Papua ke provinsi pemekaran lainnya, namun disisi lain pembagian alokasi anggaran menjadi lebih kecil karena pembagian ke provinsi pemekaran namun beban pemerintahan belum sepenuhnya terbagi ke provinsi pemekaran, diantara ASN dan aset pemerintah Provinsi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan Provinsi Papua 3 (tiga) tahun kedepan.

Kebijakan perencanaan pembangunan merupakan kebijakan strategis yang berdampak terhadap pembangunan provinsi, dari segi pembangunan manusia maupun infrastruktur. Pelaksanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas, terutama dengan ada kewenangan otonomi khusus. Oleh karena itu kinerja pembangunan dituntut untuk dapat diukur dan dievaluasi oleh instansi yang berwenang dan masyarakat luas. Audit yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI nantinya akan lebih

komprehensif, tidak hanya pemeriksaan terhadap laporan keuangan, akan tetapi juga terhadap kinerja pembangunan.

Berdasarkan pertimbangan lingkungan strategis di atas, tantangan yang dihadapi oleh Bappeda antara lain :

1. Kekayaan sumber daya alam Papua yang potensial, namun tingkat kemiskinan masyarakat masih cukup tinggi.
2. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan, baik pada Tingkat Daerah maupun Nasional.
3. Audit yang komprehensif baik dari BPK RI maupun pengawasan internal pemerintah daerah dan pusat.

Walaupun menghadapi banyak tantangan dalam pengelolaan pembangunan di Provinsi Papua, tetapi lingkungan strategis Provinsi Papua juga menawarkan peluang, antara lain :

1. Dengan adanya pemekaran provinsi, wilayah provinsi Papua menjadi lebih kecil, hal ini memudahkan pengendalian pembangunan. Pemekaran juga berdampak pada meningkatnya berbagai indikator pembangunan Provinsi Papua, karena sebagian besar wilayah Provinsi Papua saat ini relatif lebih mudah akses dibandingkan dengan wilayah provinsi Papua sebelum pemekaran.
2. Kewenangan otonomi khusus yang dilaksanakan di Provinsi Papua memberikan kesempatan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kontekstual di Papua.
3. Kapasitas ASN di Pemerintah Provinsi Papua yang cukup memadai

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Terbitnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah merubah pola perencanaan, dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap. Usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan hanyalah sebuah formalitas dari proses-proses perencanaan guna kelengkapan dokumen perencanaan yang disusun.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kemampuan aparat teknis perencana perlu untuk ditingkat, sehingga perencanaan yang disusun dalam bentuk program dan kegiatan harus bisa menjawab permasalahan pembangunan di Provinsi Papua, dan manfaatnya langsung dirasakan oleh seluruh orang asli Papua, maka Institusi Bappeda sebagai institusi perencana yang membantu Kepala Daerah harus profesional, yang didukung dengan kualitas aparatur, sikap dan mental aparatur sangatlah menentukan dalam perwujudan good governance.

Permasalahan Bappeda Provinsi Papua yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi harus dapat ditangani dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya konsistensi arah dan kebijakan dalam dokumen pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan pembangunan tahunan;
2. Masih kurangnya kesadaran aparat pemda dalam menyusun dan menggunakan dokumen perencanaan untuk kebutuhan pembangunan daerah;
3. Belum tersedianya Perdasi tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana;
4. Belum terciptanya keselarasan penyusunan rencana pembangunan daerah yang

dilakukan dengan pendekatan Politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*) termasuk pendekatan budaya khas Papua;

5. Belum terciptanya keselarasan Perencanaan Pembangunan dengan amanat OTSUS mendorong Perlindungan,Keberpihakan dan Pemberdayaan Orang Asli Papua;
6. Belum optimalnya penerapan perencanaan pembangunan partisipatif pada setiap tahapan dan jenjang pemerintahan daerah di Provinsi Papua;
7. Belum konsistennya kaitan antara penganggaranprogram/kegiatan tahunan dengan perencanaanlima tahun (RPJMD) dan tahunan (RKPD);
8. Belum terciptanya Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Daerah maupun SKPD yang berbasis kinerja;
9. Belum terbangun dan berfungsinya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Terbatasnya kapasitasdan kompetensi staf perencana, termasuk MONEV dan pengendalian Pembangunan;
11. Belum memadaninya data dasar pembangunan dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Belum optimalnya Sinergi Perencanaan Pembangunan di Daerah baik secara vertikal maupun horizontal, termasuk antara Pemerintah dengan Mitra Pembangunan.
13. Masih terlambatnya penyusunan rencana kerja pemerintah daerah dari kalender perencanaan secara nasional
14. Belum sinerginya dokumen-dokumen perencanaan, yakni antara RPJPD-RPJMD, RPJMD-RKPD, dan RKPD-RKA/DPA, serta keseluruhan dokumen perencanaan dengan RTRW Provinsi Papua
15. Belum optimalnya kompetensi SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja
16. Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.
17. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
18. Penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya berkaitan langsung dengan bahan kebijakan perencanaan dan publikasi hasil penelitian belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
19. Sistem pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan

perencanaan.

Dari seluruh permasalahan diatas maka sesuai dengan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2018-2023 dalam pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan dapat kami sampaikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah**

	<b>Masalah Pokok</b>	<b>RumusaMasalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
	Belum maksimalnya Birokasi memberi pelayanan publik secara transparan dan akuntabel	Belum maksimalnya kinerja penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	Belum Optimalnya Capaian realisasi program-program Otonomi Khusus
		Belum optimalnya sinergi antar dokumen perencanaan dan penganggaran	Masih rendahnya bayi yang memiliki akte lahir
		Belum optimalnya capaian indikator sasaran daerah dalam RPJMD	Belum optimalnya capaian penduduk yang memiliki KTP berbasis NIK
		Tingginya pelanggaran Tata Ruang	Belum optimalnya kesesuaian antara RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota
			Kurang dimanfaatkannya hasil perencanaan kawasan perbatasan

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam RPJMD 2018-2023, Visi Gubernur terpilih dirumuskan sebagai berikut :

**“PAPUA BANGKIT MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN”**

Jika memperhatikan pernyataan visi diatas, maka **Kebangkitan Memandirian** dan **Kesejahteraan** masyarakat Papua sebagai cita-cita bersama akan dapat terwujud secara

hakiki jika dalam pelaksanaan pembangunan menjawab rasa **Keadilan** bagi seluruh masyarakat di Provinsi Papua.

Penjelasan masing-masing elemen visi diatas adalah sebagai berikut :

- ***Papua Bangkit***

Terwujudnya Masyarakat Papua yang berkemauan dan bertekad tinggi sebagai kesadaran kontemplatif kolektif untuk melepaskan diri dari label ketertinggalan dan kemiskinan untuk mencapai derajat kualitas hidup yang setinggi-tingginya, sehingga mampu berdiri tegak dengan harkat dan martabat dalam bingkai Negara Kesatuan

Republik Indonesia tanpa menghilangkan identitas diri dan kekhususan ke-Papua-an. Kebangkitan ini terjadi dilevel individu, keluarga, komunitas, maupun regional. Identitas diri orang Papua diakui dan dihormati dalam berbagai level dan bidang pembangunan. Dimana Orang Papua mampu mengaktualisasikan diri dan mengambil peran diberbagai bidang pembangunan. Papua Bangkit dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin baik.

- ***Papua Mandiri***

Terwujudnya kondisi Masyarakat Papua mampu mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan kemajuan ekonomi. Dengan didukung Generasi baru Papua yang memiliki jiwa kewirausahaan (Entrepreneurship) serta ekonomi kampung tumbuh dan berkembang. Perwujudan Papua Mandiri dilakukan dengan mendorong tumbuhnya berbagai sektor unggulan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sektor kehutanan dan pariwisata harus dikembangkan sehingga memberi nilai tambah dalam pembangunan dan memastikan tersedianya lapangan kerja, serta didukung pengembangan industri pengolahan yang berbasis keunggulan potensi daerah dan industri ramah lingkungan. Papua Mandiri dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Papua pada sektor dan subsektor unggulan yang semakin baik.

- ***Papua Sejahtera***

Secara sederhana, sejahtera dipahami sebagai tidak kekurangan sesuatu apapun, perasaan aman sentosa, makmur dan selamat atau terlepas dari segala macam gangguan. Dengan pendekatan yang lain, sejahtera juga dapat dikaitkan dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat papua yang setinggi-tingginya dengan tercermin dari kenyamanan masyarakat papua dalam menjalani kehidupan atau menikmati hasil pembangunannya. Di sini, kesejahteraan dikaitkan tidak saja pada konsep lahiriah, tapi juga menjangkau segi

batiniah. Dalam konteks makro, pembangunan daerah juga dimaknai sebagai upaya mencapai kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap Masyarakat Papua untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik- baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia.

- ***Papua Berkeadilan***

Terwujudnya Keadilan adalah semua Masyarakat Papua tanpa terkecuali dapat memenuhi hak-hak dasarnya di bidang sosial, ekonomi dan budaya terutama pangan, sandang dan papan secara merata, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya. Sikap mental dan perilaku adil, menjunjung tinggi kesetaraan dan kebersamaan, didukung moral dan budaya gotong royong, saling menghormati dan menunjung tinggi nilai luhur kemanusiaan, mempertahankan eksistensi dan jati diri orang asli Papua sebagai kebanggaan sudah terbentuk dan tertanam di dalam setiap individu orang asli Papua. Pembangunan yang adil dan merata, dengan partisipasi aktif adat dan agama serta seluruh komponen masyarakat, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh Masyarakat khususnya Orang Asli Papua.

Perwujudan visi pembangunan Provinsi Papua tersebut ditempuh melalui 5 (Lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM
2. Memantapkan Rasa Aman, Tenram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
4. Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah
5. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terbelakang, Terdepan

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2018-2023 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan Bappeda maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi

ke 3 (tiga), yaitu "Penguatan Tata Kelola Pemerintahan".

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Papua**

Pada Pemerintah Pusat kementerian/lembaga yang memiliki fungsi perencanaan adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai unsur pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional. Pertama, menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional. Kedua, mensinergikan perencanaan di tingkat pusat

dan daerah untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang diinginkan. Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, Bappenas telah menyusun Rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas.

Visi Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 adalah "Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel". Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antar daerah, antar ruang, antar waktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/ Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional;
3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Keterkaitan Sasaran Kementerian PPN/Bappenas 2015 - 2019 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel;
2. Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/ Bappenas yang baik dan bersih

Sasaran tersebut diimplementasikan dalam arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang relevan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Kebijakan/strategi Bappenas juga tidak bisa dipisahkan dengan sasaran dari agenda Nawacita presiden terpilih, dimana arah kebijakan dan strategi Bappenas pada dasarnya adalah untuk mendukung agenda tersebut dalam lingkup perencanaan pembangunan tingkat nasional, diantaranya adalah;

1. Peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan dibidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan Negara, kerjasama pembangunan internasional, paratur Negara, politik, komunikasi, pengembangan wilayah, otonomi daerah, hukum, regulasi, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sarana prasarana, makro ekonomi, stabilitas system keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
2. Penyusunan rencana pembangunan di bidang politik, hukum, komunikasi, pertahanan, keamanan, kerjasama pembangunan internasional, aparatur Negara, politik, komunikasi, pengembangan wilayah, pembangunan daerah tertinggal, perbatasan Negara, rawan bencana, perkotaan, perdesaan, hukum, strategi nasional reformasi regulasi, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, integrasi antara pusat dan daerah diantaranya penyiapan kawasan industry; kawasan ekonomi khusus; kota baru; insentif ketenagakerjaan, makro ekonomi, stabilitas system keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang terkait.

Sementara itu, ada beberapa arah kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kualitas rencana pembangunan nasional, yang diantaranya bertujuan untuk; (1) Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan; (2) Memperkuat proses perencanaan secara evidence based; (3) Memperkuat kapasitas SDM dalam ranah perencanaan dan penganggaran; (4) Memetakan kapasitas SDM untuk mengarahkan jenjang karir dan opsi pengembangan akademis untuk mencapai tujuan

Bappenas; (5) Memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan; (6) Memperkuat system data dan informasi; (7) Meminimalisasi deviasi perencanaan dan penganggaran;

(8) Sinkronisasi kerangka regulasi dan kelembagaan; (9) Mendorong perubahan pola pikir dan budaya; dan (10) Peningkatan kapasitas kelembagaan perencana pusat dan daerah.

Dalam hal meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan, kebijakan dan strategi diarahkan untuk; (1) meningkatkan kualitas bisnis system pemantauan, evaluasi dan pengendalian; (2) mengembangkan system hasil pemantauan dan evaluasi; (3) mengembangkan system data dan informasi; (4) meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan tools atau instrument; (5) meningkatkan sosialisasi tools dan instrument terhadap pelaku pembangunan lain; (6) memperkuat sinkronisasi system penyusunan RKP dan Renja K/L; dan (7) memperkuat koordinasi antar unsur di daerah.

Selanjutnya, dalam berbagai implementasi visi dan misinya, kebijakan Bappenas yang terkait dengan daerah diarahkan untuk;

1. membangun hubungan yang efektif,
2. memperkuat koordinasi dalam keseluruhan proses perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian,
3. sinkronisasi pembangunan lintas wilayah,
4. sinkronisasi system data dan informasi antar wilayah,
5. analisis kerangka regulasi dan kelembagaan antar wilayah,
6. peningkatan kapasitas kelembagaan perencana melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan penyusunan perencanaan daerah, dan bimbingan penyusunan perencanaan daerah,
7. meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan tools atau instrument pemantauan dan evaluasi daerah, dan
8. meningkatkan sosialisasi tools atau instrument pemantauan dan evaluasi daerah,

Arah kebijakan ini menjadi bahan yang angin segar bagi Bappeda Provinsi, dan Kab/Kota untuk memanfaatkan fokus kebijakan Bappenas tersebut.

Sementara itu, Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Provinsi, yaitu Bappeda Provinsi, menyebutkan bahwa sasaran Bappeda Papua adalah :

1. Keterpaduan dan Konsistensi program/kegiatan pembangunan meningkat
2. Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang

telah disusun sebelumnya

3. Tersedianya data pembangunan yang akurat untuk mendukung perencanaan.

4. Konsistensi Pelaksana Penataan Ruang dengan pelaksanaan kegiatan pembangan Secara umum, telah ada keselarasan antar sasaran dari instansi Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Lebih lanjut sasaran-sasaran tersebut akan dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran beserta target per tahunnya.

Dalam upaya pencapaian sasaran, dijalankan program dan kegiatan. Sinergi program dan kegiatan Pemerintah Pusat sebagaimana disusun oleh Bappenas dengan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Papua

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pengembangan wilayah Papua merupakan hal fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik wilayah Adat Papua. Dalam 5 (lima) tahun mendatang, arah kebijakan utama pembangunan wilayah Papua difokuskan pada akselerasi pembangunan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Kerangka pengembangan wilayah Papua untuk mempercepat pembangunan dan pengurangan kesenjangan wilayah tersebut adalah sebagai berikut: 1. Penguatan pusat pertumbuhan sebagai penggerak utama pertumbuhan (engine of growth)

dengan menggali potensi dan keunggulan daerah di setiap wilayah adat. Dalam hal ini diperlukan pengembangan industri pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau peternakan di wilayah penyangga (hinterland) yang diiringi pengembangan lokasi pemasaran, dan peningkatan skill OAP agar aktif terlibat dalam pengembangan sektor unggulan tersebut. 2. Percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis sumber daya lokal melalui peningkatan kemandirian kampung atau perkampungan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pembentukan klaster komoditas lokal yang diiringi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan organisasi produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan. Budidaya dan nilai tambah lahan komunal dikembangkan dalam mendorong kegiatan ekonomi, yang didukung efisiensi perdagangan lokal, pengembangan keterampilan, serta peningkatan kemampuan kerjasama pemanfaatan lahan komunal dengan pihak luar secara berkelanjutan. 3. Peningkatan kesejahteraan di kawasan perbatasan melalui penguatan kegiatan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan, serta peningkatan kualitas

pelayanan dasar dan infrastruktur di kawasan PKSN, PLBN, dan lokasi prioritas. Dalam hal ini diperlukan pengintegrasian fungsi PLBN, PKSN, dengan lokasi prioritas, yang didukung penguatan distrik sebagai ujung tombak koordinasi pembangunan lokasi prioritas. 4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan, terutama untuk daerah pinggiran. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan tersebut dilakukan dengan pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dengan insentif dan disinsentif, memastikan keberadaan sekolah kecil di kampung dan sekolah berasrama, serta pengembangan kurikulum lokal berbasis budaya dan kearifan lokal. 5. Pengurangan ketimpangan antar wilayah melalui pemerataan kesempatan ekonomi, pemerataan infrastruktur dasar, dan konsistensi penerapan penataan ruang. 6. Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. 7. Pengelolaan urbanisasi dengan memastikan perencanaan dan penerapan tata guna lahan berkelanjutan, yang disertai pencegahan konflik horizontal, pengendalian kerusakan lingkungan, serta penyediaan rumah layak dan infrastruktur dasar di kawasan perkotaan

Arah pengembangan kewilayahan Papua terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), khususnya dalam penetapan fungsi ruang dan lokasi pengembangan wilayah. Integrasi ini diperlukan untuk mewujudkan perkembangan wilayah yang seimbang serta sesuai dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam hal ini, kebijakan umum pembangunan berkelanjutan "Green Growth berbasis wilayah adat" diperlukan sebagai bagian dari fokus pembangunan daerah Papua, khususnya dalam penguatan pusat-pusat pertumbuhan, akselerasi pembangunan wilayah tertinggal, serta mewujudkan keterkaitan antar sektor ekonomi secara berkeadilan dan berkelanjutan

Dalam KLHS RPJM provinsi Papua, isu-isu strategis diidentifikasi dari kondisi umum daerah dan isu-isu pembangunan berkelanjutan yang berkembang saat ini di Provinsi Papua. Isu-isu strategis dihimpun dari masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik, dengan mempertimbangkan unsur-unsur, antara lain :a) karakteristik wilayah (secara geografis maupun budaya), b) tingkat pentingnya potensi dampak dan c) keterkaitan antar isu strategis Pembangunan Berkelanjutan

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaahan lainnya, maka isu-isu strategis untuk menjawab permasalahan dan pelaksanaan perencanaan pada Renstra Bappeda adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanyakonsistensi arah dan kebijakan dalam dokumen pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan pembangunan tahunan;
2. Meningkatkan kesadaran aparat pemda dalam menyusun dan menggunakan dokumen perencanaan untuk kebutuhan pembangunan daerah;
3. Penyusunan Perdasi tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana;
4. Menciptakan keselarasan penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilakukan dengan pendekatan Politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*) termasuk pendekatan budaya khas papua;
5. Menciptakan keselarasan Perencanaan Pembangunan dengan amanat OTSUS mendorong Perlindungan,Keberpihakan dan Pemberdayaan Orang Asli Papua;
6. Mengoptimalkan penerapan perencanaan pembangunan partisipatif pada setiap tahapan dan jenjang pemerintahan daerah di Provinsi Papua;
7. Menjaga konsistennya kaitan antara penganggaranprogram/kegiatan tahunan dengan perencanaan lima tahun (RPJMD) dan tahunan (RKPD);
8. Menciptakan Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Daerah maupun SKPD yang berbasis kinerja;
9. Tersedia Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Meningkatkan kapasitasdan kompetensi staf perencana, termasuk MONEV dan pengendalian Pembangunan;
11. Tersedia data dasar pembangunan dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Mengoptimalkan Sinergi Perencanaan Pembangunan di Daerah baik secara vertikal maupun horizontal, termasuk antara Pemerintah dengan Mitra Pembangunan.
13. Menyesuaikan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah dengan kalender perencanaan secara nasional
14. Mensinergikan dokumen-dokumen perencanaan, yakni antara RPJPD-RPJMD, RPJMD-RKPD, dan RKPD-RKA/DPA, serta keseluruhan dokumen perencanaan dengan RTRW Provinsi Papua
15. Penempatan SDM di masing-masing bidang yang sesuai dengan kompetensi dan

kualifikasi pendidikan dan keahlian.

16. Pemeliharaan sarana dan prasarana secara optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
17. Penelitian yang dilakukan diarahkan pada bahan kebijakan perencanaan dan publikasi hasil penelitian sepenuhnya dapat ditindaklanjuti.
18. Sistem pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan Jangka Menengah Bappeda Provinsi Papua

Tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Papua sesuai dengan Misi RPJMD Provinsi Papua 2018-2023, yakni misi ke-3 "Penguatan Tata Kelola Pemerintahan" adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah"

### 4.2. Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Papua

Sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Papua sesuai dengan Tujuan Misi ke tiga PJMD Provinsi Papua 2018-2023, yakni "Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah"

**Tabel 4.1**  
**Keselarasn Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Papua**  
**Tahun 2018-2023**

<b>Misi 3</b> Penguatan Tata Kelola Pemerintahan		<b>RPJMD PROVINSI PAPUA TAHUN 2018-2023</b>				
<b>Tujuan</b> "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah"						
<b>Sasaran 4</b> Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah						
<b>Indikator Kinerja sesuai Permendagri 86/2017</b>						
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak				
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak				
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak				
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak				
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPDP	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">Jumlah Program RKPDP Tahun berkenaan</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </table>	Jumlah Program RKPDP Tahun berkenaan	X	Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan	100%
Jumlah Program RKPDP Tahun berkenaan	X					
Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan	100%					
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPDP kedalam APBD	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">Jumlah Program APBD Tahun berkenaan sesuai RKPDP</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jumlah Program RKPDP yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </table>	Jumlah Program APBD Tahun berkenaan sesuai RKPDP	X	Jumlah Program RKPDP yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	100%
Jumlah Program APBD Tahun berkenaan sesuai RKPDP	X					
Jumlah Program RKPDP yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	100%					
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">Kesesuaian prog/keg pembangunan thd pola dan struktur ruang</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Dokumen RTRW</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </table>	Kesesuaian prog/keg pembangunan thd pola dan struktur ruang	X	Dokumen RTRW	100%
Kesesuaian prog/keg pembangunan thd pola dan struktur ruang	X					
Dokumen RTRW	100%					

**Tabel 4.2**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Papua**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang terintegratif secara sektoral dan spasial		✓	✓		
			Memperkuat Perencanaan Pembangunan berbasis Data/Bukti (evidence base planning) serta penguatan pengendalian pelaksanaan pembangunan	✓	✓			✓
			Membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat untuk berperan dalam pembangunan daerah		✓	✓	✓	
			Memperkuat integrasi perencanaan pembangunan dengan perencanaan tata guna lahan, kewilayahan serta sektor sehingga prioritas pembangunan dapat terarah, terukur dengan jelas, dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan	✓	✓	✓	✓	✓
			Peningkatan pembiayaan melalui kerjasama dengan berbagai pihak dalam pemenuhan infrastruktur	✓	✓	✓	✓	✓
			Bantuan pembiayaan infrastruktur bagi kabupaten/kota yang diprioritaskan pada peningkatan konektivitas dalam rangka pengembangan rantai nilai hulu-hilir komoditi unggulan	✓	✓	✓	✓	

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Bappeda menunjukkan bagaimana cara Bappeda mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Bappeda dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Bappeda bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Bappeda mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Bappeda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Provinsi Papua. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang ekonomi dengan arah kebijakan sebagai berikut :
  - Meningkatkan kualitas perencanaan bidang ekonomi,
  - Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang ekonomi
2. Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang fisik dengan arah kebijakan sebagai berikut :
  - Meningkatkan kualitas perencanaan bidang fisik

3. Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang sosial dengan arah kebijakan sebagai berikut :
  - Meningkatkan kualitas perencanaan bidang sosial
  - Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program sosial
4. Peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan arah kebijakan sebagai berikut :
  - Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
  - Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah
  - Meningkatkan kualitas pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah
5. Peningkatan perencanaan dan pengembangan kawasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
  - Meningkatkan perencanaan pengembangan kawasan
6. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program penataan ruang

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>Tujuan</b> Mewujudkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah		
<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang ekonomi	Meningkatkan kualitas perencanaan bidang ekonomi
		Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang ekonomi
	Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang fisik	Meningkatkan kualitas perencanaan bidang fisik
		Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang fisik
	Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang sosial	Meningkatkan kualitas perencanaan bidang sosial
		Meningkatkan kualitas perencanaan bidang sosial

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang sosial
	Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang pengendalian	Meningkatkan kualitas Perencanaan pembangunan daerah
		Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah
		Meningkatkan kualitas pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah
	Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang pengembangan kawasan	Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang pengembangan kawasan dan penataan ruang
		Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program pengembangan kawasan dan penataan ruang

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Provinsi Papua, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan untuk lima tahun kedepan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2013-2018 yakni sebagai berikut :

##### **1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- e. Penyediaan alat tulis kantor
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- i. Penyediaan makanan dan minuman
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- k. Penyediaan Jasa Pengamanan

##### **2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- b. Pengadaan peralatan gedung kantor
- c. Pengadaan mebeleur
- d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- e. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

##### **3) Program peningkatan disiplin aparatur**

- a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

##### **4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- a. Pendidikan dan pelatihan formal
- b. Peningkatan Kapasitas Aparatur Fungsional Perencana

- c. Pelatihan Penyusunan Indikator Kinerja Dalam
- d. Dokumen Pembangunan Daerah Bagi Aparatur Bappeda Provinsi Papua
- e. DIKLAT Teknis Bidang Fisik Prasarana
- f. Pelatihan Penyusunan Integrasi SPM Ke Dalam
- g. Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Aparatur Bappeda

**5) Program pengembangan data/informasi**

- a. Rapat Koordinasi Pengembangan LPSE Provinsi Papua
- b. Pengembangan Verifikasi Dan Registrasi Vendor Pada LPSE Provinsi Papua
- c. Peningkatan Layanan Dan Dukungan
- d. Peningkatan Koordinasi UPT LPSE

**6) Program Kerjasama Pembangunan**

- a. Kerja Sama Provinsi Papua Dengan UNDP
- b. Pendamping PMC Program Kerjasama Pemerintah Provinsi Papua Dengan AIPD
- c. Koordinasi Program Pembangunan KHPPIA
- d. Koordinasi Program Pembangunan AMPL Provinsi Papua
- e. Rapat Forum Sinkronisasi Program Pembangunan Provinsi Dan Kabupaten/Kota
- f. Penunjang Koordinasi Subbid Pemerintahan Dan Kerjasama Mitra Pembangunan

**7) Program perencanaan pembangunan daerah**

- a. Asistensi Musrenbang Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara)
- b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANGDA) Provinsi Papua
- c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS)
- d. Rapat Kerja Teknis (RAKERNIS) BAPPEDA SE-Provinsi Papua
- e. Penyusunan Dokumen Perencanaan Internal BAPPEDA
- f. Pelaksanaan Konsolidasi Perencanaan Dan Penganggaran (KPP)
- g. Penyusunan Dokumen Usulan Pendanaan Kabupaten/Kota (UPKK)
- h. Rapat Koordinasi (RAKOR) Asosiasi BAPPEDA Se Indonesia
- i. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi Papua

**8) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

- a. Penyusunan Buku Papua Dalam Angka (PDA) dan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua
- b. Inventarisasi Pengelolaan Industri Dan Perdagangan
- c. Koordinasi Urusan Wajib Perencanaan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan,

Pariwisata Dan Keuangan

- d. Penguatan Lembaga Penjaminan Kredit Mikro, Menengah Di Provinsi Papua
- e. Pertemuan Validasi data Investasi MP3EI Koridor 6 Papua, Kepulauan Maluku

**9) Program perencanaan sosial dan budaya**

- a. Fasilitasi Dan Koordinasi Urusan Wajib Bidang Sosial Budaya
- b. Fasilitasi Dan Koordinasi Urusan Wajib Perencanaan Sub Bidang Kesejahteraan, Sosial, Kependudukan, Pendidikan Dan Kesehatan
- c. Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pencapaian RAD MDGs Provinsi Papua
- d. Sosialisasi Dokumen Strategis Penanggulangan 29 Kab/Kota Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Papua
- e. Study Banding Pelaksanaan Program Kota Layak Anak di Jawa Tengah
- f. Penunjang Klinik Perencanaan Penganggaran Dan Pemantauan Yang Berpihak Pada Masyarakat miskin (P3BM)
- g. Study Demografi Sistem Penduduk Etnis Papua Berbasis Suku- Marga
- h. Perencanaan Dan Penganggaran Berbasis Bukti (PBB) Sektor Kesehatan Ibu Dan Anak
- i. Rapat Koordinasi Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan, Kependudukan Dan Kesehatan

**10) Program Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana dan Lingkungan Hidup**

- a. Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur
- b. Perencanaan Dan Pengembangan Program Fisik Prasarana
- c. Pemantauan Dan Pelaporan Hasil Pembangunan Infrastruktur Papua 214 Sumber Dana Pasal 34 Ayat 3 (f) UU Nomor 21 Tahun 2001
- d. Penunjang Koordinasi Komite Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Di Provinsi Papua (KP3EI) Bidang Infrastruktur
- e. Penunjang Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur (Pasal 34 Ayat 3 (f) UU Nomor 21 Tahun 2001
- f. Pembahasan Usulan Rencana Dana Infrastruktur Bagian Kabupaten/Kota Tahun 2015
- g. Fasilitasi Pokja Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Provinsi Papua
- h. Operasional SIMTARU Dan SIM Infrastruktur

## **11) Program Pengembangan Mutu Penelitian dan Pengembangan**

- a. Evaluasi Tahun Pertama Pelaksanaan PROSPEK Di Provinsi Papua
- b. Rapat Koordinasi Penelitian Dan Pengembangan Se Provinsi Papua
- c. Evaluasi Pelaksanaan LITBANG Perekonomian Dan Keuangan
- d. Evaluasi Pelaksanaan Litbang Pemerintahan Dan Pemasarakatan
- e. Evaluasi Pelaksanaan Litbang SDA Dan IPTEK
- f. Jaringan Penelitian Dan Pengembangan
- g. Penyusunan Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Papua
- h. Reproduksi Sejarah Perjuangan Rakyat Irian Jaya
- i. Focus Group Discussion (FGD) Pemerintah Provinsi Papua
- j. Penelitian Mandiri Fungsional
- k. Pemetaan Kebudayaan Papua Sebagai Panduan Pembangunan Berbasis Budaya Di Provinsi Papua (Lanjutan)
- l. Kajian Kebutuhan Penyelenggaraan PON XX Tahun 2022 Di Provinsi Papua
- m. Rapat Koordinasi Penanganan Lahan Kritis Dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)
- n. Pembinaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- o. Analisa Data Dasar Pembangunan Provinsi Papua
- p. Penyusunan RAD Sistem Inovasi Daerah (SIDA)
- q. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Penurunan emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Papua

## **12) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup**

- a. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) 1627

## **13) Program Perencanaan Tata Ruang**

- a. Workshop Peningkatan Kapasitas BKPRD Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua
- b. Pendamping Proyek Tata Ruang Dan Investasi Hijau UKCCU
- c. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran RTRW Provinsi Papua
- d. Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Papua

## 6.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
<b>1.05-15</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>Peningkatan Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>persen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>637.275.000</b>	<b>100</b>	<b>1.532.250.000,00</b>	<b>100</b>	<b>705.375.000,00</b>	<b>100</b>	<b>775.912.500,00</b>	<b>100</b>	<b>853.503.750,00</b>	<b>500</b>	<b>4.504.316.250</b>
1.05-15.16		Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Papua Tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2033	Tersebarluasnya PERDA Provinsi Papua tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2033 ke Stakeholders	Kab/Kota	0	0,00	29	400.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	400.000.000,00
1.05-15.16		Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Papua Tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2033	Tersebarluasnya PERDA Provinsi Papua tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2033 ke Stakeholders	Kab/Kota	0	0,00	29	400.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	400.000.000,00
1.05-5.17		Lokakarya Peningkatan Kapasitas BKPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	Tersedianya data	kab/Kota	0	0,00	0	0,00	29	476.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	476.000.000,00
1.05-5.18		Peningkatan Kinerja BKPRD Provinsi Papua	Terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang Provinsi Papua	Persen	0	0,00	100	237.275.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	237.275.000,00
1.05-5.19		Pendamping Proyek Tata Ruang dan Investasi Hijau UKCCU	Terlaksananya pendamping proyek tata ruang	Workstem	0	0,00	0	0,00	3	215.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	215.000.000,00
1.05-5.20		Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran RTRW Provinsi Papua	Tersedianya data Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran RTRW	Dokumen	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
1.05-5.21		Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang	Tersedianya Data Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang	Kegiatan	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
1.05-15.22		Peningkatan Koordinasi Urusan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah	Peningkatan koordinasi urusan tata ruang dan pengembangan wilayah	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	29	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	0,00
1.05-15.23		Inventarisasi Sarana dan Prasarana Perbatasan Negara di Provinsi Papua	Tersedianya data inventarisasi sarana dan prasarana perbatasan negara	kab/Kota	0	0,00	0	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00
1.05-15.24		Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Papua	jumlah pertemuan	Pertemuan	0	0,00	0	0,00	5	641.250.000,00	5	705.375.000,00	5	775.912.500,00	5	853.503.750,00	20	2.976.041.250,00
<b>1.05-16</b>	<b>1 - Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten.</b>	<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang</b>	<b>Persen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>6.600.000.000,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>6.600.000.000,00</b>
1.05-16.10		Penunjang Kegiatan Bidang Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang	Terwujudnya rencana pembangunan wilayah yang berbasis pembangunan berkelanjutan	%	0	0,00	75	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	250.000.000,00
1.05-16.11		Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Disepakatinya berbagai hal dalam penyelenggaraan penataan ruang Provinsi	%	0	0,00	50	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	200.000.000,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
			Papua															
1.05 - 16.1 2		Penunjang Kinerja BKPRD Provinsi Papua	Stakeholder menyetujui penyelesaian dalam permasalahan penataan ruang Provinsi Papua	%	0	0,00	100	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	300.000.000,00
1.05 - 16.1 3		Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Pegunungan Tengah	Tersusunnya RAPERDA RTR Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Pegunungan Tengah	%	0	0,00	100	2.500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	2.500.000.000,00
1.05 - 16.1 4		Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Merauke dan Sekitarnya	Tersusunnya RAPERDA RTR Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Merauke dan sekitarnya	%	0	0,00	100	2.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	2.000.000.000,00
1.05 - 16.1 5		Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi tentang RTRW Provinsi Papua 2013-2033	Stakeholder memahami substansi PERDA RTRW Provinsi Papua	%	0	0,00	50	1.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	1.000.000.000,00
1.05 - 16.1 6		Lokakarya Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi dan Kab./Kota se - Provinsi Papua	Peningkatan SDM Bidang Penataan Ruang Provinsi Papua dan Kab/Kota	%	0	0,00	50	350.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	350.000.000,00
<b>1.06 - 1</b>	<b>1 - Meningkatkan Profesionalisme dan Akuntab</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>	<b>12</b>	<b>3.284.916.390,00</b>	<b>12</b>	<b>4.107.161.000,00</b>	<b>12</b>	<b>4.022.856.012,00</b>	<b>12</b>	<b>4.425.141.613,00</b>	<b>12</b>	<b>4.867.655.775,00</b>	<b>60</b>	<b>20.707.730.790,00</b>

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
	<b>ilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur.</b>																	
1.06 - 1.1		Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat	Surat	1000	0,00	1000	397.580.000,00	1000	78.940.000,00	1000	529.178.980,00	1000	582.096.878,00	1000	640.306.566,00	5000	2.228.102.424,00
			Honorarium Tenaga Honorer	Orang	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00
1.06 - 1.2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran telepon. Air dan listrik	Bulan	12	0,00	12	57.400.000,00	12	37.200.000,00	12	69.454.000,00	12	76.399.400,00	12	84.039.340,00	12	324.492.740,00
1.06 - 1.6		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional	Bulan	12	0,00	12	141.400.000,00	12	132.000.000,00	12	171.094.000,00	12	188.203.400,00	12	207.023.740,00	12	839.721.140,00
1.06 - 1.8		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya petugas kebersihan dan peralatan kebersihan	Bulan	12	0,00	12	10.000.000,00	12	25.000.000,00	12	12.100.000,00	12	13.310.000,00	12	14.641.000,00	12	75.051.000,00
1.06 - 1.10		Penyediaan alat tulis kantor	Terwujudnya penyediaan ATK	Bulan	12	0,00	12	300.000.000,00	12	500.000.000,00	12	363.000.000,00	12	399.300.000,00	12	439.230.000,00	12	2.001.530.000,00
1.06 - 1.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	0,00	12	377.000.000,00	12	333.301.000,00	12	456.170.000,00	12	501.787.000,00	12	551.965.700,00	12	2.220.223.700,00
1.06 - 1.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedia dan terpeliharanya kelistrikan kantor	Bulan	12	0,00	12	6.600.000,00	12	50.000.000,00	12	7.986.000,00	12	8.784.600,00	12	9.663.060,00	12	83.033.660,00
1.06 - 1.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Bulan	12	0,00	12	131.000.390,00	12	52.280.000,00	12	158.510.472,00	12	174.361.519,00	12	191.797.671,00	12	707.950.052,00
1.06 - 1.17		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Bulan	12	0,00	12	500.000.000,00	12	1.295.000.000,00	12	605.000.000,00	12	665.500.000,00	12	732.050.000,00	12	3.797.550.000,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
1.06 - 1.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Bulan	12	0,00	12	1.243.936.000,00	12	1.500.000.000,00	12	1.505.162.560,00	12	1.655.678.816,00	12	1.821.246.698,00	12	7.726.024.074,00
1.06 - 1.19		Penyediaan Jasa Pengamanan	Tersedianya petugas keamanan kantor	Bulan	12	0,00	12	120.000.000,00	12	103.440.000,00	12	145.200.000,00	12	159.720.000,00	12	175.692.000,00	12	704.052.000,00
<b>1.06 - 2</b>	<b>1 - Meningkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur.</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>	<b>12</b>	<b>7.064.628.610,00</b>	<b>12</b>	<b>7.576.202.000,00</b>	<b>12</b>	<b>2.495.345.018,00</b>	<b>12</b>	<b>2.744.879.520,00</b>	<b>12</b>	<b>3.019.367.472,00</b>	<b>60</b>	<b>22.900.422.620,00</b>
1.06 - 2.7		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor guna menunjang kelancaran tugas kantor	Kegiatan	1	0,00	1	381.000.000,00	1	130.000.000,00	1	461.010.000,00	1	507.111.000,00	1	557.822.100,00	1	2.036.943.100,00
1.06 - 2.9		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kegiatan	1	0,00	1	604.950.000,00	1	145.000.000,00	1	731.989.500,00	1	805.188.450,00	1	885.707.295,00	1	3.172.835.245,00
1.06 - 2.10		Pengadaan mebeleur	Tersedianya meubelair kantor	Kegiatan	1	0,00	1	282.618.610,00	1	125.000.000,00	1	341.968.518,00	1	376.165.370,00	1	413.781.907,00	1	1.539.534.405,00
1.06 - 2.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Bulan	12	0,00	12	705.700.000,00	12	713.000.000,00	12	853.897.000,00	12	939.286.700,00	12	1.033.215.370,00	12	4.245.099.070,00
1.06 - 2.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor	Bulan	12	0,00	12	88.000.000,00	12	0,00	12	106.480.000,00	12	117.128.000,00	12	128.840.800,00	12	440.448.800,00
1.06 - 2.42		Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Unit	0	0,00	1	5.002.360.000,00	1	6.463.202.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	11.465.562.000,00
<b>1.06 - 3</b>	<b>1 - Meningkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur.</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Meningkatnya disiplin Aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>454.800.000,00</b>	<b>100</b>	<b>84.150.000,00</b>	<b>100</b>	<b>244.904.000,00</b>	<b>100</b>	<b>269.394.400,00</b>	<b>100</b>	<b>296.333.840,00</b>	<b>500</b>	<b>1.349.582.240,00</b>

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
	<b>Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur.</b>																	
1.06 - 3.2		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur pemerintah	Kegiatan	1	0,00	1	202.400.000,00	1	0,00	1	244.904.000,00	1	269.394.400,00	1	296.333.840,00	1	1.013.032.240,00
1.06 - 3.5		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Persen	0	0,00	90	252.400.000,00	90	84.150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	90	336.550.000,00
<b>1.06 - 5</b>	<b>2 - Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>orang</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.876.250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>4.671.400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>2.417.112.500,00</b>	<b>0</b>	<b>2.658.823.750,00</b>	<b>0</b>	<b>2.924.706.125,00</b>	<b>0</b>	<b>14.548.292.375,00</b>
1.06 - 5.1		Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan kapasitas aparatur	Orang	30	0,00	30	500.000.000,00	30	275.000.000,00	30	605.000.000,00	30	665.500.000,00	30	732.050.000,00	150	2.777.550.000,00
1.06 - 5.12		Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal	Orang	10	0,00	10	146.250.000,00	10	707.400.000,00	10	176.962.500,00	10	194.658.750,00	10	214.124.625,00	50	1.439.395.875,00
1.06 - 5.13		Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya pegawai yang ikut pelatihan perencanaan pembangunan daerah	Orang	100	0,00	100	920.000.000,00	100	0,00	100	1.113.200.000,00	100	1.224.520.000,00	100	1.346.972.000,00	500	4.604.692.000,00
1.06 - 5.17		Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Terlatihnya Sumber daya Aparatur yang berkualitas	Persen	0	0,00	95	310.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	95	310.000.000,00
1.06 - 5.18		TOT dan Study Banding dalam rangka Peningkatan SDM	Terlaksananya TOT dan Study Banding bagi aparatur (UPT LPSE)	Orang	0	0,00	0	0,00	20	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	0,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
1.06 - 5.20		Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Rangka Penyusunan RKPD, RPJMD dan RKA	Tersedianya SDM Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Rangka Penyusunan RKPD, RPJMD dan RKA	Kegiatan	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
1.06 - 5.21		Peningkatan Kapasitas Aparatur Fungsional Perencanaan	Terlaksananya kapasitas fungsional	Kegiatan	0	0,00	0	0,00	1	553.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	553.250.000,00
1.06 - 5.22		Pelatihan Penyusunan Daerah Bagi Aparatur Bappeda Provinsi Papua	Jumlah Peserta Pelatihan	Orang	0	0,00	0	0,00	50	374.500.000,00	50	411.950.000,00	50	453.145.000,00	50	498.459.500,00	200	1.738.054.500,00
1.06 - 5.23		DIKLAT Teknis Bidang Fisik Prasarana	Jumlah Orang Yang mengikuti	Orang	0	0,00	0	0,00	10	100.000.000,00	10	110.000.000,00	10	121.000.000,00	10	133.100.000,00	40	464.100.000,00
1.06 - 5.24		Peningkatan Kapasirtas LPSE	Jumlah Orang yangb mengikuti	Orang	0	0,00	0	0,00	30	2.278.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	2.278.500.000,00
1.06 - 5.25		Pelatihan Penyusunan Integrasi SPM ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur Bappeda	Jumlah Orang yangb mengikuti	Orang	0	0,00	0	0,00	30	182.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	182.750.000,00
1.06 - 5.26		Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengolahan Data Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yangb mengikuti	Orang	0	0,00	0	0,00	30	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	100.000.000,00
1.06 - 5.27		Peningkatan dan Pelatihan Teknologi Informasi di Bappeda Provinsi Papua	Jumlah Orang yangb mengikuti	Orang	0	0,00	0	0,00	30	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	100.000.000,00
<b>1.06 - 6</b>	<b>2 - Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemban</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Keuangan</b>	<b>Tahun</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>151.000.000,00</b>	<b>1</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>1</b>	<b>160.710.000,00</b>	<b>1</b>	<b>176.781.000,00</b>	<b>1</b>	<b>194.459.100,00</b>	<b>5</b>	<b>907.950.100,00</b>

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
	<b>gunan Daerah.</b>																	
1.06 - 6.2		Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	Kegiatan	1	0,00	1	15.000.000,00	1	75.000.000,00	1	18.150.000,00	1	19.965.000,00	1	21.961.500,00	1	150.076.500,00
1.06 - 6.3		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terlaksananya penyusunan laporan prognosis	Kegiatan	1	0,00	1	0,00	1	75.000.000,00	1	38.500.000,00	1	42.350.000,00	1	46.585.000,00	1	202.435.000,00
1.06 - 6.4		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan akhir tahun	Kegiatan	1	0,00	1	30.000.000,00	1	75.000.000,00	1	36.300.000,00	1	39.930.000,00	1	43.923.000,00	1	225.153.000,00
1.06 - 6.5		Penyusunan SOP Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan SKPD	Terlaksananya penyusunan SOP	Laporan	1	0,00	1	56.000.000,00	1	0,00	1	67.760.000,00	1	74.536.000,00	1	81.989.600,00	1	280.285.600,00
1.06 - 6.6		Penertiban Asset SKPD	Terlaksananya penertiban Asset SKPD Bappeda	Persen	0	0,00	75	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	75	50.000.000,00
<b>1.06 - 15</b>	<b>1 - Meningkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur.</b>	<b>Program Pengembangan data/informasi</b>	<b>Tersedianya data dan informasi</b>	<b>persen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80</b>	<b>1.740.000.000,00</b>	<b>80</b>	<b>4.084.330.000,00</b>	<b>80</b>	<b>0,00</b>	<b>80</b>	<b>0,00</b>	<b>80</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>5.824.330.000,00</b>
1.06 - 15.11		Updating dan Pengembangan Website Bappeda	Terlaksananya Updating Website Bappeda	Website	0	0,00	1	300.000.000,00	1	279.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	579.550.000,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp				
1.06 - 15.13		Pengembangan Data Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terlaksnaanya Informasi Pengembangan n Data Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	SKPD	0	0,00	80	250.000.000,00	28	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	28	250.000.000,00
			Terlatihnya panitia. vendor provinsi kab/kota	Vendor	0	0,00	0	0,00	1500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1500	0,00
1.06 - 15.17		Sistem Manajemen Data Dasar Pembangunan	Tersedianya sistem data dasar pembangunan	Sistem	0	0,00	1	330.000.000,00	1	458.630.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	788.630.000,00
1.06 - 15.18		Pengumpulan dan Reproduk Data Dasar Pembangunan	Tersusunnya pengumpulan dan penyusunan reproduksi data dasar pembangunan	Dokumen	0	0,00	1	160.000.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	160.000.000,00
1.06 - 15.19		Pengumpulan dan Penyusunan Data Kebijakan Daerah dan Pusat Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan	Tersedianya Dokumen Data Kebijakan Pemerintah	Dokumen	0	0,00	1	250.000.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	250.000.000,00
1.06 - 15.20		Penyusunan Data/Informasi Peragaan Hasil-Hasil Pembangunan	Tersusunnya buku tentang data/informasi peragaan visualisasi hasil-hasil pembangunan	Dokumen	0	0,00	1	230.000.000,00	1	227.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	457.000.000,00
1.06 - 15.28		Penyusunan Buku Hasil-Hasil Pembangunan Provinsi Papua	Tersusunnya buku Hasil-hasil Pembangunan Provinsi Papua	Dokumen	0	0,00	1	220.000.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	220.000.000,00
1.06 - 15.29		Peningkatan Dukungan, Layanan dan Pendampingan Pengguna LPSE (VENDOR)	Terlaksananya dukungan layanan terhadap pengguna LPSE	User	0	0,00	0	0,00	5000	253.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5000	253.900.000,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
			(VENDOR)															
1.06 - 15.30		Penataan Administrasi Ketatausahaan UPT - LPSE	Terlaksananya penataan Administrasi	Tahun	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
1.06 - 15.31		Pelaksanaan Administrasi Sistem Elektronik	Terkendalinya pelaksanaan LPSE	User	0	0,00	0	0,00	5000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5000	0,00
1.06 - 15.32		Registrasi dan Verifikasi Pengguna LPSE	Terlaksananya verifikasi registrasi terhadap pengguna LPSE	User	0	0,00	0	0,00	75	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5000	0,00
1.06 - 15.33		Rapat Koordinasi Teknis LPSE Kabupaten/Kota se Provinsi Papua	Terbentuknya LPSE di Kabupaten/Kota	Kab./Kota	0	0,00	0	0,00	29	276.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	276.000.000,00
1.06 - 15.34		Peningkatan Kapasitas LPSE	Terwujudnya Layanan LPSE	persen	0	0,00	0	0,00	75	2.061.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	75	2.061.750.000,00
1.06 - 15.35		Peningkatan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Tersedianya data di Kabupaten/Kota	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	29	157.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	157.500.000,00
1.06 - 15.36		Peningkatan dan Pelatihan Teknologi Informasi di Bappeda Provinsi Papua	Tersedianya SDM yang menguasai informatika	Kegiatan	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
1.06 - 15.37		Peningkatan Teknologi Informasi di BAPPEDA Provinsi Papua	Tersedianya jaringan internet	kegiatan	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
1.06 - 15.38		Profil Pembangunan Provinsi Papua	Terlaksananya Profil Pembangunan	Dokumen	0	0,00	0	0,00	1	370.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	370.000.000,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
<b>1.06 - 16</b>	<b>1 - Meningkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur.</b>	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>Jumlah Kerjasama Program Pembangunan dengan Lembaga Donor</b>	<b>Tahun</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>1.487.650.000,00</b>	<b>1</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>	<b>2.487.650.000,00</b>
1.06 - 16.6		Kerjasama Provinsi Papua dengan UNDP	Terlaksananya kerjasama dengan mitra pembangunan UNDP di Papua	Kab/Kota	0	0,00	8	500.000.000,00	8	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	750.000.000,00
1.06 - 16.7		Pendamping PMC Program Kerjasama Pemerintah Provinsi Papua dengan AIPD Provinsi Papua	Terlaksananya pengelolaan keuangan publik yang baik	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	29	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	300.000.000,00
1.06 - 16.8		Pendamping PMC Program Kerjasama Pemerintah Provinsi Papua dengan Lembaga Mitra Donor	Terlaksananya pengelolaan keuangan publik yang baik	Kab/Kota	0	0,00	29	468.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	468.500.000,00
1.06 - 16.9		Koordinasi Program Pembangunan KHPPIA Provinsi Papua	Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas hidup ibu dan anak	Kab/Kota	0	0,00	8	234.150.000,00	8	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	434.150.000,00
1.06 - 16.10		Koordinasi Program AMPL Provinsi Papua	Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang air bersih dan sanitasi lingkungan	Kab/Kota	0	0,00	29	285.000.000,00	29	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	535.000.000,00
1.06 - 16.11		Rapat Forum Sinkronisasi Program Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya forum koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga mitra	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	29	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	0,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
			donor															
1.06 - 16.1.2		Penunjang Korodisasi Subbid Pemerintahan dan Mitra Kerjasama Pembangunan	Terkoordinirnya Perencanaan Subbid Pemerintahan dan Mitra Kerjasama Pembangunan	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	29	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	0,00
1.06 - 16.1.3		Rapat Koordinasi Mitra Kerjasama Program Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya forum koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga mitra donor	Kab/kota	0	0,00	0	0,00	29	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	0,00
<b>1.06 - 17</b>	<b>1 - Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten.</b>	<b>Program Pengembangan Wilayah Perbatasan</b>	<b>Pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang</b>	<b>persen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>700.000.000,00</b>	<b>50</b>	<b>7.200.000.000,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>7.900.000.000,00</b>
1.06 - 17.2.1		Penyusunan Profil Infrastruktur dan Pendetailan Road Map Infrastruktur Provinsi Papua	Terlaksananya Roadmap Pembangunan Wilayah Perbatasan. Darat dan Laut di Provinsi Papua	Dokumen	0	0,00	1	0,00	1	700.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	700.000.000,00
1.06 - 17.2.2		Profil Distrik dan Kampung Perbatasan	Tersusunnya Profil Distrik dan Kampung Wilayah Perbatasan RI-PNG	%	0	0,00	75	0,00	75	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	500.000.000,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
1.06 - 17.2.3		Penyusunan Rencana Kawasan Satuan Wiayah Pengembangan (SWP) II, V, VI	Tersusunnya rencana satuan wilayah pengembangan	%	0	0,00	55	0,00	55	5.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	5.000.000.000,00
1.06 - 17.2.4		Reevaluasi Pembangunan Wilayah Perbatasan	Terwujudnya pembangunan perbatasan yang berbasis pembangunan berkelanjutan	%	0	0,00	75	0,00	75	1.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	55	1.000.000.000,00
1.06 - 17.2.5		Roadmap Pembangunan Wilayah Perbatasan, Darat dan Laut di Provinsi Papua	Terlaksananya Roadmap Pembangunan Wilayah Perbatasan	Dokumen	0	0,00	1	700.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	700.000.000,00
<b>1.06 - 21</b>	<b>2 - Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.</b>	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Tersedianya Dokumen Perencanaan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>6</b>	<b>1.875.000.000,00</b>	<b>1</b>	<b>19.483.645.000,00</b>	<b>1</b>	<b>15.395.575.000,00</b>	<b>1</b>	<b>13.544.123.300,00</b>	<b>1</b>	<b>14.575.615.630,00</b>	<b>1</b>	<b>15.710.257.193,00</b>	<b>5</b>	<b>78.709.216.123,00</b>
	<b>2 - Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.</b>		<b>Tingkat Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran, serta Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>60</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
1.06 - 21.8		Penyusunan rancangan RKPD	Terlaksananya Penyusunan RKPD Provinsi Papua	Dokumen	12	675.000.000,00	12	742.500.000,00	12	600.000.000,00	12	898.425.000,00	12	988.267.500,00	12	1.087.094.250,00	1	4.316.286.750,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
1.06 - 21.2.1		Pembinaan Koordinasi Pengendalian dan Monitoring Pembangunan Daerah	Terbinanya koordinasi pengendalian dan monitoring pembangunan daerah	Kab/kota; SKPD Provinsi	0	0,00	17	500.000.000,00	29	552.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	1.052.500.000,00
1.06 - 21.2.3		Asistensi Monitoring dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Terlaksananya tupoksi sub bidang monitoring dan pelaporan	Persen	0	0,00	85	150.000.000,00	1	211.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	85	361.000.000,00
1.06 - 21.2.4		Pelaksanaan Monitoring/Pantauan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Provinsi Papua	Terlaksananya monitoring/pemantauan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN di Provinsi Papua pada 29 Kab/Kota	Kab/Kota	0	0,00	29	1.567.000.000,00	29	2.525.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	4.092.400.000,00
1.06 - 21.2.5		Penyusunan Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Di Provinsi Papua	Tersusunnya laporan pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Provinsi Papua	Judul buku	0	0,00	2	300.000.000,00	2	385.210.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	685.210.000,00
1.06 - 21.2.6		Penyusunan Resume DIPA dan DPA Provinsi Papua	Tersusunnya Resume DPA dan DIPA Provinsi Papua TA. 2013	Dokumen	0	0,00	1	100.000.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100.000.000,00
1.06 - 21.2.7		Asistensi Pengendalian Internal	Tercapainya Asistensi Pengendalian	Dokumen	0	0,00	1	250.000.000,00	0	0,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	1.000.000.000,00
r		Pelaksanaan Pengendalian Program dan Kegiatan APBD Provinsi Papua	Terlaksananya pengendalian dan kegiatan APBD Provinsi Papua TA. 2013	SKPD	0	0,00	44	903.000.000,00	44	1.194.110.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	44	2.097.110.000,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD		
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
1.06 - 21.2 9		Penyusunan Pedoman / Juknis / Juklak APBD	Tersusunnya pedoman pengelolaan dana Otsus TA. 2014 dan pedoman pelaksanaan APBD TA. 2014	Dokumen	0	0,00	2	150.000.000,00	2	292.455.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	442.455.000,00
1.06 - 21.3 0		Asistensi Analisa dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah Orang yang melakukan Asistensi	Kegiatan	0	0,00	1	250.000.000,00	1	0,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	1.000.000.000,00
1.06 - 21.3 1		Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Tersusunnya laporan kinerja pembangunan daerah	Dokumen	0	0,00	50	250.000.000,00	2	250.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	500.050.000,00
1.06 - 21.3 2		Pengembangan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SIMONEP) Provinsi Papua	Terlatihnya SDM Apratur tentang SIMONEP Provinsi Papua	Orang	0	0,00	58	393.865.000,00	1	246.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	58	640.365.000,00
1.06 - 21.3 3		Pelaksanaan Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran (KPP)	Terwujudnya pelaksanaan konsolidasi perencanaan dan penganggaran	Kegiatan	1	0,00	1	755.290.000,00	1	750.000.000,00	1	913.900.900,00	1	1.005.290.900,00	1	1.105.820.089,00	1	4.530.301.979,00
1.06 - 21.3 4		Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Terlaksananya Pembahasan RKA SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Dokumen	1	450.000.000,00	1	495.000.000,00	0	0,00	1	598.950.000,00	1	658.845.000,00	1	724.729.500,00	1	2.477.524.500,00
1.06 - 21.3 5		Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua	Tersedianya dokumen RKPD	Dokumen	1	0,00	1	520.000.000,00	1	600.000.000,00	1	629.200.000,00	1	692.120.000,00	1	761.332.000,00	1	3.202.652.000,00
1.06 - 21.3 7		Asistensi Musrenbang Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penjaringan	Terlaksananya asistensi musrenbang di 29 Kab/Kota	Kab/Kota	58	0,00	58	700.000.000,00	58	700.000.000,00	58	847.000.000,00	58	931.700.000,00	58	1.024.870.000,00	290	4.203.570.000,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
		Asmara																
1.06 - 21.38		Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua (MUSRENBANGDA)	Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan daerah	Kegiatan	1	0,00	1	700.000.000,00	1	916.500.000,00	1	847.000.000,00	1	931.700.000,00	1	1.024.870.000,00	1	4.420.070.000,00
1.06 - 21.39		Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS)	Pembahasan program dan kegiatan di tingkat nasional	Kegiatan	1	0,00	1	660.000.000,00	1	816.900.000,00	1	798.600.000,00	1	878.460.000,00	1	966.306.000,00	1	4.120.266.000,00
1.06 - 21.40		Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen perencanaan kabupaten/kota	Dokumen	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00
1.06 - 21.43		Pengembangan Aplikasi Usulan Pendanaan Kabupaten Kota (UPKK)	Tersedianya aplikasi pendanaan untuk Kab/Kota	kegiatan	1	0,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	302.500.000,00	1	332.750.000,00	1	366.025.000,00	1	1.501.275.000,00
1.06 - 21.44		Penyusunan Dokumen Perencanaan Internal Bappeda	Terlaksananya penyusunan beberapa dokumen BAPPEDA	Kegiatan	1	0,00	1	339.000.000,00	1	400.000.000,00	1	410.190.000,00	1	451.209.000,00	1	496.329.900,00	1	2.096.728.900,00
1.06 - 21.46		Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi Papua	Laporan Pertanggungjawaban Gubernur	Kegiatan	1	0,00	1	900.000.000,00	1	650.000.000,00	1	1.089.000.000,00	1	1.197.900.000,00	1	1.317.690.000,00	1	5.154.590.000,00
1.06 - 21.47		Rapat Kerja Teknis (RAKERNIS) Bappeda Se-Provinsi Papua	Kesepakatan dan menyamakan persepsi antara BAPPEDA Provinsi dengan BAPPEDA Kab/Kota	Kegiatan	1	0,00	1	637.940.000,00	1	700.000.000,00	1	771.907.400,00	1	849.098.140,00	1	934.007.954,00	1	3.892.953.494,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
1.06 - 21.49		Sosialisasi Aplikasi Pelaporan dan E-Money Berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006	a	a	0	0,00	1	250.000.000,00	0	0,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	1.000.000.000,00
1.06 - 21.52		Penyusunan Pedoman Pembahasan URD Otsus Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen pembahasan URD Otsus Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0,00	1	110.000.000,00	1	750.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	860.000.000,00
1.06 - 21.53		Pembahasan URD/RD Otsus	Tersusunnya dokumen Rencana Definitif (RD) Otsus 29 Kabupaten/Kota	Kab/Kota	0	0,00	29	353.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	353.500.000,00
1.06 - 21.55		Pembinaan Program dan Kegiatan Otsus di 29 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Program Kegiatan Otsus di 29 Kabupaten/Kota	Persen	0	0,00	80	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80	500.000.000,00
1.06 - 21.56		Penyusunan dan Publikasi Hasil-Hasil Pembangunan Otsus Tahun 2110-2111	Tersusunnya dokumen hasil-hasil pembangunan Otsus	Persen	0	0,00	75	275.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	75	275.000.000,00
1.06 - 21.59		Peningkatan Kinerja BAPPEDA Provinsi Papua	Terlaksananya peningkatan kinerja bagi aparatur BAPPEDA	Kegiatan	1	0,00	1	500.000.000,00	1	0,00	1	605.000.000,00	1	665.500.000,00	1	732.050.000,00	1	2.502.550.000,00
1.06 - 21.66		Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi	Paket	0	0,00	1	500.000.000,00	0	0,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	2.000.000.000,00
1.06 - 21.67		Peningkatan Kapasitas Aparatur MONEV (Studi Banding dan BINTEK)	Terwujudnya pelaksanaan studi banding dan bintek bagi aparatur monev	Orang	0	0,00	30	250.000.000,00	30	246.500.000,00	30	250.000.000,00	30	250.000.000,00	30	250.000.000,00	150	1.246.500.000,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
1.06 - 21.68		Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Tahunan Kab/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Tahunan di 29 Kab/Kota	Kegiatan	0	0,00	29	500.000.000,00	29	0,00	29	500.000.000,00	29	500.000.000,00	29	500.000.000,00	145	2.000.000.000,00
1.06 - 21.69		Pengembangan Data Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Tersosialisasinya Sistem Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di 28 SKPD Provinsi. 1500 Vendor. 12 Kab/kota. 350 Paket.	Tahun	0	0,00	1	929.200.000,00	1	0,00	1	929.200.000,00	1	929.200.000,00	1	929.200.000,00	5	3.716.800.000,00
1.06 - 21.70		Penyusunan Rencana Aksi Daerah dan Pelaporan UKP4 (Inpres 1/2013, 2/2013, 3/2010 dan TEPPA)	Terlatihnya Aparatur dalam penerapan Rencana Aksi Daerah dan Pelaporan UKP4	Orang	0	0,00	77	300.000.000,00	78	108.450.000,00	79	300.000.000,00	80	300.000.000,00	81	300.000.000,00	395	1.308.450.000,00
1.06 - 21.71		Penyusunan KUA PPAS Provinsi Papua	Tersedianya KUA dan PPAS	Bulan	12	750.000.000,00	12	825.000.000,00	12	0,00	12	998.250.000,00	12	1.098.075.000,00	12	1.207.882.500,00	12	4.129.207.500,00
1.06 - 21.72		Koordinasi Peningkatan Kinerja Sekretariat BAPPEDA Provinsi Papua	Terlaksananya peningkatan kinerja bagi aparatur	Kegiatan	1	0,00	1	500.000.000,00	1	0,00	1	605.000.000,00	1	665.500.000,00	1	732.050.000,00	1	2.502.550.000,00
1.06 - 21.73		Penyusunan RENSTRA BAPPEDA Provinsi Papua	Tersusunnya Renstra Bappeda Provinsi Papua	Dokumen	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100.000.000,00
1.06 - 21.80		Penyusunan dan Penggandaan Buletin Bappeda	Tersusunnya dokumen buletin bappeda	Persen	0	0,00	75	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	75	200.000.000,00
1.06 - 21.81		Rapat Koordinasi Pembangunan 5 (lima) Wilayah di Provinsi Papua	Terlaksannnya koordinasi pembangunan 5 (lima) wilayah di Provinsi Papua	Persen	0	0,00	75	327.350.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	75	327.350.000,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
1.06 - 21.8 2		Desiminasi dan Sosialisasi Dokumen Perencanaan	Terlaksananya desiminasi dan sosialisasi dokumen perencanaan	Dokumen	0	0,00	1	1.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.000.000.000,00
1.06 - 21.8 3		Penyusunan Resume Buku Saku RPJMD	Tersusunnya resume buku saku RPJMD	Persen	0	0,00	90	350.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	90	350.000.000,00
1.06 - 21.8 5		Sosialisasi Inpres No. 3 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pembangunan Berkeadilan (UKP4)	Tersedianya SDM yg memahami tentang percepatan pembangunan berkeadilan (UKP4)	Kegiatan	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
1.06 - 21.8 6		Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan	Tersedianya data hasil asistensi analisa dan evaluasi	Kegiatan	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
1.06 - 21.8 8		Temu Konsultasi Pengendalian Pembangunan Kabupaten/Kota	Terkoordinasinya Pengendalian Pembangunan Daerah	Orang/Provinsi/Kab	0	0,00	0	0,00	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	0,00
1.06 - 21.8 9		RAKOR Asosiasi BAPPEDA Se Indonesia	Persamaan Persepsi menyangkut Perencanaan Pembangunan	Kegiatan	0	0,00	0	0,00	1	1.700.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.700.000.000,00
1.06 - 21.9 0		Revitalisasi Kapet dan Assesment Perubahan KEK di Wilayah Pembangunan Strategis		a	0	0,00	0	0,00	1	550.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	550.000.000,00
<b>1.06 - 22</b>	<b>2 - Tercapainya stabilitas makro ekonomi.</b>	<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>	<b>Terlaksananya Pembangunan Ekonomi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>3.726.098.000,00</b>	<b>100</b>	<b>4.450.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>1.754.500.000,00</b>	<b>100</b>	<b>1.929.950.000,00</b>	<b>100</b>	<b>3.470.409.800,00</b>	<b>500</b>	<b>15.330.957.800,00</b>

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
1.06 - 22.10		Penyusunan Buku Papua Dalam Angka dan Buku Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua	Terlaksananya penyusunan dokumen PDA dan PDRB	Dokumen	0	0,00	2	551.130.000,00	2	450.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	1.001.130.000,00
1.06 - 22.11		Pengembangan Potensi Pariwisata di Provinsi Papua	Terlaksananya Pengembangan Potensi Pariwisata di Provinsi Papua	Kegiatan	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
1.06 - 22.12		Inventarisasi Pengelolaan Industri dan Perdagangan	Tersedianya dokumen data industri dan perdagangan di Papua	Dokumen	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
1.06 - 22.13		Koordinasi Urusan Wajib Perencanaan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan Keuangan	Tersedianya Data koordinasi perencanaan Sub Bidang Perindustrian. Perdagangan. Pariwisata dan Keuangan	Kegiatan	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00
1.06 - 22.16		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Perkebunan, SDA, Perikanan dan Kehutanan	Tersedianya Data Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Subbid Pertanian. Perkebunan. SDA. Perikanan dan Kehutanan	Kegiatan	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00
1.06 - 22.17		Rapat Kerja Terbatas Bidang Ekonomi Papua	Tersedianya Data Hasil Rapat Kerja Terbatas Bidang Ekonomi Papua	Rapat	0	0,00	0	0,00	1	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	500.000.000,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
1.06 - 22.18		Pemetaan Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Berbasis Komoditas Unggulan di 5 Wilayah	Tersedianya Data Pemetaan Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Berbasis Sumber Daya Lokal di 5 Wilayah Adat	Dokumen	0	0,00	0	0,00	1	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	500.000.000,00
1.06 - 22.19		Penyusunan Profil Pembangunan Ekonomi Papua	Tersedianya Data Profil Pembangunan Ekonomi Papua	Dokumen	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
1.06 - 22.20		Penguatan Lembaga Penjaminan Kredit, Mikro, Menengah di Provinsi Papua	Tersedianya Data Penguatan Lembaga Penjaminan Kredit. Mikro. Menengah di Provinsi Papua	Kegiatan	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
1.06 - 22.21		Pemetaan Pengembangan Kawasan Sentra Industri Di Papua	Tersedianya Hasil Study Banding Tentang Pemetaan Pengembangan Kawasan Sentra Industri Di Papua	Kegiatan	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
1.06 - 22.22		Fasilitasi Pelaksanaan Prospek di 29 Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Prospek di 29 Kab/Kota	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	29	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	0,00
1.06 - 22.23		Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata	Kegiatan	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
1.06 - 22.25		Review Renstra dan Renja SKPD Bidang Ekonomi Provinsi Papua	Tersedianya Data Renstra dan Renja SKPD Bidang Ekonomi Provinsi Papua	Dokumen	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00

Kode Program/ Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD		
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
1.06 - 22.26		Pertemuan Validasi Data Investasi MP3EI Koridor 6 Papua, Kepulauan	Tersedianya Data Validasi Data Investasi MP3EI	Kegiatan	0	0,00	0	0,00	1	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	250.000.000,00
1.06 - 22.27		Fasilitasi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Di Lapago, Animha, Mamta, Mepago	Tersedianya Data tentang pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK)	Kegiatan	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
1.06 - 22.28		Diseminasi Roadmap Bidang Ekonomi 2013-2018 di Provinsi Papua	Tersedianya Data Roadmap Bidang Ekonomi	Kegiatan	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
1.06 - 22.29		Fasilitasi dan Revitalisasi KAPET Biak	Meningkatnya fungsi dan Kinerja KAPET Biak	Kegiatan	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
1.06 - 22.30		Perencanaan Pengembangan Kewirausahaan Bagi Masyarakat Asli Papua	Tersedianya Data Perencanaan Pengembangan Kewirausahaan Bagi Masyarakat Asli Papua	Kegiatan	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
1.06 - 22.39		Fasilitasi dan Koordinasi Urusan Wajib Perencanaan Sub Bidang Ekonomi	Terselenggara nya Koordinasi	Bulan	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00	12	0,00	12	423.500.000,00	12	465.850.000,00	12	512.435.000,00	12	1.751.785.000,00
1.06 - 22.40		Rapat Koordinasi Pembangunan Ekonomi Papua	Tercapainya Kesepakatan dalam Kebijakan	Bulan	12	0,00	12	650.000.000,00	12	0,00	12	786.500.000,00	12	865.150.000,00	12	951.665.000,00	12	3.253.315.000,00
1.06 - 22.41		Fasilitasi Pelaksanaan Penas Jawa Timur 2014	Terselenggara nya Koordinasi	Bulan	0	0,00	12	1.224.968.000,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	1.347.464.800,00	12	2.572.432.800,00
1.06 - 22.50		Pengembangan Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Pengembangan Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persen	0	0,00	80	500.000.000,00	80	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80	800.000.000,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
1.06 - 22.5 2		Monitoring RAD Pangan Gizi Provinsi Papua	Tersedianya Data Pelaksanaan RAD PG	Bulan	0	0,00	12	450.000.000,00	12	0,00	12	544.500.000,00	12	598.950.000,00	12	658.845.000,00	12	2.252.295.000,00
1.06 - 22.5 3		Koordinasi Pelaksanaan Prospek di 29 Kabupaten/Kota	a	a	0	0,00	0	0,00	1	550.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	550.000.000,00
1.06 - 22.5 4		Penyusunan Buku Come to Papua	a	a	0	0,00	0	0,00	1	750.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	750.000.000,00
1.06 - 22.5 5		Kampanye Papua Investment Years	a	a	0	0,00	0	0,00	1	750.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	750.000.000,00
<b>1.06 - 23</b>	<b>2 - Meningkatkan pendapatan masyarakat adat pemilik hak rakyat.</b>	<b>Program perencanaan sosial dan budaya</b>	<b>Peningkatan perencanaan sosial dan budaya</b>	<b>Tahun</b>	<b>1</b>	<b>1.350.000.000,00</b>	<b>1</b>	<b>4.105.000.000,00</b>	<b>1</b>	<b>3.113.100.000,00</b>	<b>1</b>	<b>1.796.850.000,00</b>	<b>1</b>	<b>1.976.535.000,00</b>	<b>1</b>	<b>2.174.188.500,00</b>	<b>5</b>	<b>13.165.673.500,00</b>
1.06 - 23.4 1		Fasilitasi dan Koordinasi Urusan Wajib Perencanaan Sub Bidang Sosial Kesejahteraan, Sosial, kependudukan, Pendidikan dan Kesehatan	Terkoordinasinya perencanaan dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial, kependudukan, pendidikan dan kesehatan di Provinsi dan Kab./Kota	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	29	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	0,00
1.06 - 23.4 2		Fasilitasi Penyusunan Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) di Kabupaten/Kota	a	a	1	400.000.000,00	1	440.000.000,00	0	0,00	1	532.400.000,00	1	585.640.000,00	1	644.204.000,00	1	2.202.244.000,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
1.06 - 23.4 3		Penyusunan Dokumen Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) Provinsi Papua	a	a	1	500.000.000,00	1	550.000.000,00	0	0,00	1	665.500.000,00	1	732.050.000,00	1	805.255.000,00	1	2.752.805.000,00
1.06 - 23.4 4		Monitoring RAD MDGs Provinsi Papua	a	a	1	450.000.000,00	1	495.000.000,00	0	0,00	1	598.950.000,00	1	658.845.000,00	1	724.729.500,00	1	2.477.524.500,00
1.06 - 23.4 5		Sosialisasi Dokumen Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) Provinsi Papua	Tercapainya sosialisasi dokumen analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) di Kabupaten/Kota	Kab/Kota	0	0,00	2	275.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	275.000.000,00
1.06 - 23.4 6		Lokakarya Penyusunan Dokumen Kemiskinan Provinsi Papua	Terlaksananya Lokakarya Penyusunan dokumen kemiskinan Provinsi Papua	Persen	0	0,00	75	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	75	300.000.000,00
1.06 - 23.4 7		Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pencapaian RAD MDGs Provinsi Papua	Tersedianya data pencapaian pelaksanaan RAD MDGs Tahun 2015	Kab/Kota	0	0,00	29	445.000.000,00	29	275.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	720.250.000,00
1.06 - 23.4 8		Rapat Forum Sinkronisasi Program Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya rapat forum sinkronisasi program Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persen	0	0,00	80	600.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80	600.000.000,00
1.06 - 23.4 9		Finalisasi Dokumen Roadmap Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Infrastruktur	Tersusunnya Dokumen Roadmap bidang Pendidikan. Kesehatan. Ekonomi dan Infrastruktur	Buku	0	0,00	100	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	500.000.000,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
1.06 - 23.50		Rapat Forum SKPD Pembangunan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Kependudukan	Adanya kesepakatan antara SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	29	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	0,00
1.06 - 23.51		Sosialisasi Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Papua	Terwujudnya perencanaan dokumen SPKD di Provinsi Papua	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	29	350.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	350.000.000,00
1.06 - 23.52		Study Banding Pelaksanaan Program Kota Layak Anak di Jawa Tengah	Meningkatnya pemahaman kota Layak Anak di Provinsi Jawa Tengah	Orang	0	0,00	0	0,00	12	228.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	228.750.000,00
1.06 - 23.53		Penunjang Klinik P3BM Provinsi Papua	Tersedianya klinik P3DM Provinsi Papua	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	29	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	0,00
1.06 - 23.54		Forum Koordinasi Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan se Provinsi Papua	Tersedianya kesepakatan di Bidang Pendidikan dan kesehatan se Provinsi Papua	Kab./Kota	0	0,00	0	0,00	29	332.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	332.500.000,00
1.06 - 23.55		Study Demografi Sistem Penduduk Etnis Papua Berbasis Suku-Marga	Tersedianya Dokumen Degrafi Sistem Penduduk Etnis Papua	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00
1.06 - 23.56		Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Bukti (PBB) Sektor Kesehatan Ibu dan Anak	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Bukti Sektor Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Papua	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	10	499.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	499.100.000,00
1.06 - 23.58		Pengembangan Perencanaan Bidang Sosial Budaya	Tersedianya perencanaan pembangunan bidang sosial	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	29	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	0,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
			budaya															
1.06 - 23.59		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Terkoordinasinya perencanaan program dan kegiatan sosial budaya di Provinsi dan Kabupaten/Kot	SKPD; Kab/Kota	0	0,00	27	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	500.000.000,00
1.06 - 23.60		Penunjang koordinasi Subbid Pemerintah dan Kerjasama Mitra Pembangunan	a	a	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00
1.06 - 23.61		Pembinaan Program Bidang Sosial Budaya	a	a	0	0,00	0	0,00	1	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	300.000.000,00
1.06 - 23.62		Pembinaan Program Kesejahteraan, Sosial, Kependudukan, pendidikan dan Kesehatan	a	a	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00
1.06 - 23.63		Forum Sinkronisasi Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya se Provinsi Papua	a	a	0	0,00	0	0,00	1	600.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	600.000.000,00
1.06 - 23.64		Klinik Perencanaan Penganggaran dan Pemantauan yang Berpihak pada Masyarakat Miskin (P3BM)	a	a	0	0,00	0	0,00	1	127.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	127.500.000,00
<b>1.06 - 26</b>	<b>1 - Implementasi Rencana Tata Ruang</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana dan Lingkungan Hidup</b>	<b>Peningkatan Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana dan</b>	<b>Tahun</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>3.366.200.000,00</b>	<b>1</b>	<b>8.250.060.000,00</b>	<b>1</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>1</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>1</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>5</b>	<b>12.516.260.000,00</b>

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
	<b>secara konsisten.</b>		<b>Lingkungan Hidup</b>															
1.06 - 26.7		Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur (Pasal 34 Ayat 3 (f) Undang-Undang Otsus Papua)	Terlaksananya rapat koordinasi infrastruktur	Dokumen	0	0,00	1	616.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	616.200.000,00
1.06 - 26.9		Pengembangan Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana	Terlaksananya kegiatan koordinasi di bidang Fisra	Persen	0	0,00	75	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	75	500.000.000,00
1.06 - 26.11		Sistem Informasi Monitoring Data Spasial Pembangunan Jalan dan Jembatan di Provinsi Papua	Terlaksananya sistem informasi monitoring data spasial pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Papua	Persen	0	0,00	75	1.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	85	1.000.000.000,00
1.06 - 26.18		Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Fisik Prasarana	Meningkatnya kapasitas aparatur bidang fisik prasarana	Peserta	0	0,00	0	0,00	20	0,00	20	300.000.000,00	20	300.000.000,00	20	300.000.000,00	20	900.000.000,00
1.06 - 26.19		Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur	Terlaksananya rapat koordinasi, konsultasi program dan kegiatan bidang infrastruktur	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	29	550.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	550.000.000,00
1.06 - 26.20		Peningkatan Koordinasi Urusan Fisik Prasarana	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan bidang infrastruktur	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	29	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	0,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
1.06 - 26.2 1		Pemantauan dan Pelaporan Hasil Pembangunan Infrastruktur Papua 2014 Sumber Dana Pasal 34 Ayat 3 (f) UU Nomor 21 Tahun 2001	Tersedianya Data Pembangunan Infrastruktur	Kegiatan	0	0,00	1	1.000.000.000,00	1	1.100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.100.000.000,00
1.06 - 26.2 2		Rapat Koordinasi Komite Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Provinsi Papua (KP3EI)	Terlaksananya rapat koordinasi komite percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia di Provinsi Papua (KP3EI)	persen	0	0,00	75	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	75	250.000.000,00
1.06 - 26.2 3		Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Infrastruktur dan Updating Data Infrastruktur di Provinsi Papua	Tersedianya Data Tentang Infrastruktur	Kegiatan	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
1.06 - 26.2 4		Penunjang Koordinasi Komite Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) di Provinsi Papua Bidang Infrastruktur	Tersedianya Data Koordinasi Komite Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI)	Kegiatan	0	0,00	0	0,00	1	270.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	270.750.000,00
1.06 - 26.2 7		Penunjang Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur (Pasal 34 Ayat 3 (f) UU Nomor 21 Tahun 2001)	Tersedianya data perencanaan pembangunan infrastruktur	Kegiatan	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
1.06 - 26.28		Pembahasan Usulan Rencana Dana Infrastruktur Bagian Kabupaten/Kota Tahun 2015	Tersedianya data URD Infrastruktur Kab/Kota	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	29	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	200.000.000,00
1.06 - 26.29		Perencanaan dan Pengembangan Program Infrastruktur Transportasi, Telekomunikasi dan Cipta Karya	Terlaksananya Peningkatan koordinasi urusan pembangunan. Bina Marga. Cipta Karya dan Telekomunikasi	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	29	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	200.000.000,00
1.06 - 26.30		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Kegiatan Tahun Jamak	Tersedianya Data Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
1.06 - 26.31		Penunjang Kelompok Kerja (POKJA) Air Minum Penyehatan Lingkungan (AMPL)	Tersedianya data penunjang kelompok kerja (POKJA) Air Minum	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
1.06 - 26.32		Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan GERBANGMAS HASRAT PAPUA di 5 Kabupaten	a	a	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
1.06 - 26.33		Launcing Pembangunan Terpadu Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejarah harapan Seluruh Rakyat Papua (GERBANGMAS HASRAT PAPUA)	a	a	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
1.06 - 26.34		Pentusunan Peraturan Gubernur dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan GERBANGMAS HASRAT PAPUA	a	a	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
1.06 - 26.35		Perencanaan dan Pengembangan Program Fisik Prasarana	a	a	0	0,00	0	0,00	1	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	300.000.000,00
1.06 - 26.36		Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Data Infrastruktur Provinsi Papua	a	a	0	0,00	0	0,00	1	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	300.000.000,00
1.06 - 26.37		Penyusunan Masterplan Infrastruktur dan Pengembangan Ekonomi PON XX	a	a	0	0,00	0	0,00	1	3.600.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3.600.000.000,00
1.06 - 26.38		Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni	a	a	0	0,00	0	0,00	1	235.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	235.000.000,00
1.06 - 26.39		Perencanaan dan Pengembangan Program Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	a	a	0	0,00	0	0,00	1	192.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	192.720.000,00
1.06 - 26.41		Penyusunan Sistem Monitoring Pelaksanaan pembangunan Jalan dan Jembatan Berbasis Data Spasial	a	a	0	0,00	0	0,00	1	1.301.590.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.301.590.000,00
<b>1.06 - 27</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembinaan</b>	<b>Program Pengembangan Mutu Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>5.103.330.000,00</b>	<b>100</b>	<b>3.769.100.000,00</b>	<b>100</b>	<b>9.093.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>2.655.800.000,00</b>	<b>100</b>	<b>2.508.350.000,00</b>	<b>500</b>	<b>23.129.580.000,00</b>

Kode Program/ Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp				
	<b>gunan Daerah.</b>		<b>an</b>															
1.06 - 27.1		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	Terlaksananya Koordinasi Kelitbangan Daerah di Provinsi Papua	Persen	0	0,00	80	500.000.000,00	80	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80	500.000.000,00
1.06 - 27.2		Diklat Penelitian dan Pengembangan	Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan	Peneliti	0	0,00	0	0,00	10	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	0,00
1.06 - 27.3		Bimbingan Teknis Manajemen Penelitian	Terlaksananya bintek manajemen penelitian	Orang	0	0,00	0	0,00	50	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	0,00
1.06 - 27.4		Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Antar Daerah	Terlaksananya kerjasama penelitian dan pengembangan antar daerah	Provinsi	0	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
1.06 - 27.5		Pelaksanaan Penelitian Mandiri	Terlaksananya penelitian mandiri bagi pejabat peneliti	Kegiatan	0	0,00	0	0,00	8	350.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	350.000.000,00
1.06 - 27.6		Focus Group Discussion (FGD)	Terlaksananya diskusi dari kegiatan FGD di lingkup pemerintah Provinsi Papua	Kali	0	0,00	0	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00
1.06 - 27.7		Sosialisasi Permendagri No. 20 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah	Terlaksananya sosialisasi Permendagri 20 tahun 2011	Orang	0	0,00	0	0,00	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	0,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp				
1.06 - 27.8		Workshop Kesiapan Masyarakat Dalam Menyongsong Pelaksanaan PON ke XX di Provinsi Papua	Terlaksananya workshop kesiapan masyarakat dalam menyongsong pelaksanaan PON XX di Provinsi Papua	Orang	0	0,00	0	0,00	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	0,00
1.06 - 27.9		Penyusunan Media Penelitian dan Pengembangan (Jurnal)	Terlaksananya penyusunan jurnal pembangunan dan inovasi Papua	Buku	0	0,00	0	0,00	400	225.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	400	225.000.000,00
1.06 - 27.10		Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Provinsi Papua	Terlaksananya rapat kerja koordinasi penelitian dan pengembangan Provinsi Papua	Kali	0	0,00	0	0,00	1	400.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	400.000.000,00
1.06 - 27.11		Penyusunan Roadmap Penelitian dan Pengembangan Provinsi Papua	Terlaksananya Penyusunan Roadmap Kebijakan Bidang Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Papua Tersedianya Panduan Kebijakan Bidang Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Papua	Kegiatan	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
1.06 - 27.12		Study Pengembangan Ekonomi Kreatif Menunjang Pariwisata di Papua	Terlaksananya study pengembangan ekonomi kreatif menunjang pariwisata di Papua	Kegiatan	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD		
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.06 - 27.13		Evaluasi Pelaksanaan PROSPEK Tahun Pertama Lapago	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan PROSPEK tahun pertama Lapago	Kegiatan	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
1.06 - 27.14		Kajian Kebutuhan Penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 di Provinsi Papua	Terlaksananya analisis kebutuhan penyelenggaraan PON XX tahun 2020	Buku	0	0,00	0	0,00	50	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	0,00
1.06 - 27.15		Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Distribusi Beras Merauke Dalam Rangka Mencukupi Kebutuhan Pangan Papua	Terlaksananya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi beras Merauke dlm rangka mencukupi kebutuhan pangan Papua	Laporan	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
1.06 - 27.16		Analisis Kemahalan Harga Barang di Provinsi Papua	Terlaksananya analisis kemahalan harga barang di daerah pegunungan di Provinsi Papua	Buku	0	0,00	0	0,00	50	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	0,00
1.06 - 27.17		Study Dampak Bantuan RASKIN Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat Lapago	Terlaksananya study dampak bantuan RASKIN terhadap pola konsumsi masyarakat Lapago	Buku	0	0,00	0	0,00	50	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	0,00
1.06 - 27.18		Koordinasi Pengelolaan SDA dan Teknologi	Terlaksananya koordinasi pengelolaan SDA dan teknologi	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	10	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	0,00
1.06 - 27.19		Koordinasi Pengelolaan Litbang Perekonomian dan Keuangan	Terlaksananya koordinasi pengelolaan Litbang perekonomian dan keuangan	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	29	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	0,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
1.06 - 27.20		Koordinasi Pengelolaan Pemerintahan dan Pemasarakatan	Terlaksananya koordinasi pengelolaan pemerintahan dan pemsarakatan	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	29	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	0,00
1.06 - 27.21		Pemetaan Kebudayaan Papua Sebagai Panduan Pembangunan Berbasis Budaya di Provinsi Papua (Lanjutan)	Terlaksananya pemetaan kebudayaan Papua sebagai panduan pembangunan berbasis budaya di Provinsi Papua (Lanjutan)	Kegiatan	0	0,00	0	0,00	1	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	500.000.000,00
1.06 - 27.33		Asistensi Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya	a	a	0	0,00	1	197.500.000,00	0	0,00	1	195.500.000,00	1	196.800.000,00	1	195.000.000,00	1	784.800.000,00
1.06 - 27.34		Asistensi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kekayaan Alam di Provinsi Papua			0	0,00	1	1.996.600.000,00	0	0,00	1	199.000.000,00	1	195.500.000,00	1	198.850.000,00	1	2.589.950.000,00
1.06 - 27.36		Pembinaan Penelitian dan Pengembangan Daerah			0	0,00	1	299.450.000,00	1	300.000.000,00	1	298.500.000,00	1	297.500.000,00	1	299.500.000,00	1	1.494.950.000,00
1.06 - 27.43		Workshop Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua	Terlaksananya koordinasi kelitbangan daerah Provinsi Papua	persen	0	0,00	80	339.210.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80	339.210.000,00
1.06 - 27.46		Peningkatan Kapasitas SDM Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya SDM Peneliti	orang	0	0,00	12	369.650.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	369.650.000,00
1.06 - 27.47		Focus Group Discussion (FGD) Pemerintah Provinsi Papua	Terlaksananya Fokus Group Discussion (FGD) Pemerintah Provinsi Papua	persen	0	0,00	90	210.170.000,00	90	225.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	90	435.170.000,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD		
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
1.06 - 27.49		Studi Banding Bidang Penelitian dan Pengembangan			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	375.000.000,00	0	0,00	1	400.000.000,00	1	775.000.000,00
1.06 - 27.52		Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Papua	Tersusunnya Jurnal penelitian dan pengembangan pemerintah Provinsi Papua	Buku	0	0,00	70	156.000.000,00	400	225.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	400	381.000.000,00
1.06 - 27.53		Jarlit Pendidikan	Terlaksananya Jarlit Pendidikan	persen	0	0,00	70	185.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	70	185.300.000,00
1.06 - 27.54		Jarlit Kesehatan	Terlaksananya Jejaring Kesehatan di Provinsi Papua	Kab/Kota	0	0,00	1	0,00	15	0,00	14	0,00	29	0,00	15	0,00	1	0,00
1.06 - 27.55		Study Mutu Pendidikan di Provinsi Papua setelah OTSUS	Terindikasinya Mutu Pendidikan di Papua Setelah OTSUS	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	15	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	0,00
1.06 - 27.56		Studi Ketersediaan Ruang Kelas Tingkat Dasar Provinsi Papua	Tersedianya Jumlah Ruang Kelas Tingkat Dasar di Provinsi Papua	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	650.000.000,00	0	0,00	0	0,00	15	650.000.000,00
1.06 - 27.57		Studi Ketersediaan Tenaga Medis Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Prov Papua	Meningkatnya Jumlah Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan di Provinsi Papua	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	766.000.000,00	0	0,00	15	766.000.000,00
1.06 - 27.58		Studi Ketersediaan Lapangan Kerja dengan Lulusan Perguruan Tinggi di Provinsi Papua	Tersedianya Jumlah Lapangan Kerja bagi Lulusan PT di Provinsi Papua	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	550.000.000,00	10	550.000.000,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
1.06 - 27.59		Kajian Implementasi Permendagri 13 Tahun 2007 Khususnya tentang Pembagian Urusan Wajib dan Urusan Pilihan dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Daerah	Terlaksananya Pembagian yang Adil Antara Pembiayaan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Daerah	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	975.000.000,00	0	0,00	0	0,00	10	975.000.000,00
1.06 - 27.60		Kajian Kinerja Dewan Riset Daerah Provinsi Papua	Terindikasi Kinerja DRD Provisinsi Papua	Kegiatan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	450.000.000,00	0	0,00	1	450.000.000,00
1.06 - 27.61		Kajian Pengembangan Pembelajaran pada Sekolah Kampung	Adanya Pedoman Pengembangan Pembelajaran Sekolah Kampung	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	865.000.000,00	15	865.000.000,00
1.06 - 27.62		Kajian Pengembangan Kabupaten inovatif	Adanya Pedoman Pengembangan Kabupaten Inovatif	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	750.000.000,00	10	750.000.000,00	0	0,00	10	1.500.000.000,00
1.06 - 27.63		Studi Alokasi Pendanaan dan Penetapan Prioritas Pembangunan Menurut Kategori Urusan Wajib dan Pilihan Bidang Pemerintahan di Provinsi Papua	Adanya Pembagian yang Adil antara Pembiayaan Urusan Wajib dan Urusan pilihan dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi daerah	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	850.000.000,00	0	0,00	0	0,00	10	850.000.000,00
1.06 - 27.64		Kajian Pengembangan Potensi Olahraga Unggulan dalam Menyongsong Pelaksanaan PON ke .... di Provinsi Papua	Meningkatnya Prestasi dan Potensi Olahraga Unggulan di Provinsi Papua	Kab/kota	0	0,00	0	0,00	12	0,00	12	650.000.000,00	0	0,00	0	0,00	12	650.000.000,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
1.06 - 27.6 5		Kajian Pengaruh Migrasi Penduduk terhadap Pembangunan Kehidupan Orang Asli Papua	Terindikasi Pengaruh-Pengaruh Migrasi Penduduk Terhadap Pembangunan Kehidupan Orang Asli Papua	Kab/kota	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	750.000.000,00	0	0,00	0	0,00	15	750.000.000,00
1.06 - 27.6 6		Kajian tentang Sebab Akibat Urbanisasi Pendk dari Kampung ke Perkotaan di Tanah Papua	Terindikasi Sebab Akibat Urbanisasi Penduduk di Wilayah Tanah Papua	Kab/kota	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	750.000.000,00	0	0,00	0	0,00	15	750.000.000,00
1.06 - 27.6 7		Studi Penyelenggaraan Kelembagaan Perangkat Daerah dalam Era Reformasi	Meningkatkan Penyelenggaraan Perangkat Daerah yang Lebih Profesional	SKPD	0	0,00	0	0,00	45	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	45	0,00
1.06 - 27.6 8		Kajian Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah yang Berbasis Kinerja	Tersedianya Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah yang Berbasis Kinerja	SKPD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	45	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	45	500.000.000,00
1.06 - 27.6 9		Kajian Efektifitas Pengembangan Ekonomi Kerayatan untuk Menunjang Pendapatan Keluarga Berbasis Hak Masyarakat Adat	Terlaksananya Pengembangan Ekonomi Kerayatan yang Efisien untuk Menunjang Pendapatan Keluarga Berbasis Hak Masyarakat Adat	Kab/kota	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	650.000.000,00	0	0,00	0	0,00	8	650.000.000,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
1.06 - 27.7 0		Reproduksi Buku Hasil-hasil Penelitian Bappeda Provinsi Papua	Terlaksananya Reproduksi buku hasil-hasil penelitian Bappeda Provinsi Papua	persen	0	0,00	70	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	70	200.000.000,00
1.06 - 27.7 1		Pembinaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya	Terlaksananya asistensi Litbang Bidang Sosial Budaya di Kab/Kota	Persen	0	0,00	80	299.450.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80	299.450.000,00
1.06 - 27.7 2		Penyusunan Buku Sejarah Perkembangan Pemerintah di Provinsi Papua	Tersusunnya buku sejarah perkembangan Pemerintah di Tanah Papua	persen	0	0,00	100	350.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	350.000.000,00
1.06 - 27.7 3		Fasilitasi Kelembagaan Pusat inovasi Produk Unggulan Papua	a	a	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
1.06 - 27.7 4		Evaluasi Pelaksanaan LITBANG Perekonomian dan Keuangan	a	a	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00
1.06 - 27.7 5		Evaluasi Pelaksanaan LITBANG Pemerintah dan Masyarakat	a	a	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00
1.06 - 27.7 6		Reproduksi Sejarah Perjuangan Rakyat Irian Jaya	a	a	0	0,00	0	0,00	1	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	300.000.000,00
1.06 - 27.7 7		Analisa Data Dasar Pembangunan Provinsi Papua	a	a	0	0,00	0	0,00	1	295.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	295.000.000,00
1.06 - 27.7 8		Penyusunan RAD Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	a	a	0	0,00	0	0,00	1	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	300.000.000,00
1.06 - 27.7 9		Jaringan Penelitian dan Pengembangan	a	a	0	0,00	0	0,00	1	249.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	249.100.000,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp				
<b>1.06 - 28</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK</b>	<b>Tersedianya Data dan Informasi Hasil Litbang IPTEK</b>	<b>Dokumen</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>	<b>13</b>	<b>4.122.450.000,00</b>	<b>10</b>	<b>12.635.000.000,00</b>	<b>12</b>	<b>1.611.850.000,00</b>	<b>13</b>	<b>1.450.000.000,00</b>	<b>14</b>	<b>2.050.000.000,00</b>	<b>62</b>	<b>21.869.300.000,00</b>
1.06 - 28.1		Pengembangan Kampung Inovatif Produk Unggulan Papua	Teridentifikasi kampung inovatif produk unggulan Papua	Buku	0	0,00	0	0,00	50	850.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	850.000.000,00
1.06 - 28.2		Pembangunan Sistem Dinamis Dalam Mendukung Peningkatan IPM Provinsi Papua	Terlaksananya pembangunan aplikasi sistem dinamis dalam mendukung peningkatan IPM Provinsi Papua	Orang	0	0,00	0	0,00	6	450.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	450.000.000,00
1.06 - 28.3		Pembangunan Model Perhitungan Gas Rumah Kaca di Lingkungan Kawasan Cycloop	Terlaksananya perancangan model perhitungan Gas Rumah Kaca di lingkungan kawasan cycloop	Kegiatan	0	0,00	0	0,00	1	750.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	750.000.000,00
1.06 - 28.4		Kajian Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu Mendorong Kemandirian Pangan	Terlaksananya kajian pengembangan sistem pertanian terpadu mendorong kemandirian lokal	Buku	0	0,00	0	0,00	50	650.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	650.000.000,00
1.06 - 28.5		Kajian Pelaksanaan Pembangunan MIFEE di Kabupaten Merauke	Terlaksananya kajian pelaksanaan pembangunan MIFEE di Kabupaten Merauke	Kegiatan	0	0,00	0	0,00	1	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	500.000.000,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
1.06 - 28.6		Penelitian Tifa Sebagai Alat Kesenian Budaya Asli Papua	Terlaksananya penelitian Tifa sebagai alat kesenian budaya asli Papua	Kabupaten	0	0,00	0	0,00	5	600.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	600.000.000,00
1.06 - 28.7		Identifikasi Masyarakat Inovasi Kreatif	Terlaksananya identifikasi masyarakat inovatif kreatif	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	10	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	300.000.000,00
1.06 - 28.8		Pengembangan Pengelolaan Sistem Inovasi Daerah	Berkembangnya pengelolaan sistem inovasi daerah	Kegiatan	0	0,00	0	0,00	1	450.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	450.000.000,00
1.06 - 28.9		Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Provinsi Papua	Berkembangan pengelolaan sumber daya genetik Provinsi Papua	Kegiatan	0	0,00	0	0,00	1	450.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	450.000.000,00
1.06 - 28.10		Kajian Penggunaan Solar Cell Sebagai Sumber Energi Terbarukan	Terlaksananya kajian penggunaan solar cell sbg sumber energi terbarukan	Buku	0	0,00	0	0,00	50	750.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	750.000.000,00
1.06 - 28.11		Kajian Pengembangan Trasnportasi Kereta Api di Papua	Terlaksananya kajian pengembangan transportasi kereta api di Papua	Kegiatan	0	0,00	0	0,00	1	750.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	750.000.000,00
1.06 - 28.12		Kajian Efisiensi Moda Angkutan Umum di Wilayah Adat Tabi	Terlaksananya kajian efisiensi moda angkutan umum di wilayah adat Tabi	Kegiatan	0	0,00	0	0,00	1	750.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	750.000.000,00
1.06 - 28.16		Studi Struktur Ekonomi Kampung Sebagai Formasi Sosial Masyarakat di Wilayah Pegunungan	Terciptanya Formasi Sosial Masyarakat di Wilayah Pegunungan Melalui Pengembangan Ekonomi Kampung	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	7	700.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	700.000.000,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp				
1.06 - 28.18		Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Komoditi Unggulan Provinsi Papua	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pengembangan Komoditi Unggulan Provinsi Papua	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	12	950.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	950.000.000,00
1.06 - 28.19		Studi komoditas Unggulan dan Peluang Usaha Kedelai di Wilayah Pegunungan	Terciptanya Komoditas Unggulan dan Peluang Usaha Kedelai di Wilayah Pegunungan	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	788.000.000,00	0	0,00	0	0,00	7	788.000.000,00
1.06 - 28.20		Studi budidaya Ikan Mujair Perikanan Darat di Wilayah Pegunungan	Terciptanya Budidaya Ikan Mujair Perikanan Darat di Wilayah Pegunungan	Kab/kota	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	800.000.000,00	0	0,00	7	800.000.000,00
1.06 - 28.21		Studi Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Peternakan Sapi di Provinsi Papua	Tersedianya Rencana Induk Pengembangan Industri Peternakan Sapi di Provinsi Papua	Kab/Kota	0	0,00	5	850.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	850.000.000,00
1.06 - 28.22		Studi Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Pakan Ternak di Provinsi Papua Peternakan Sapi di Provinsi Papua	Tersedianya Pengembangan Industri Peternakan Sapi di Provinsi Papua	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	5	785.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	785.000.000,00
1.06 - 28.23		Kajian Pemanfaatan TTG dalam Pengembangan UKM Berbasis Hasil Laut	Meningkatnya Pemanfaatan TTG dalam Pengembangan UKM Berbasis Hasil Laut	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	650.000.000,00	5	550.000.000,00	7	1.200.000.000,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
1.06 - 28.24		Kajian Pemanfaatan IT dalam Mengatasi Kekurangan Guru di Kampung	Meningkatnya Pemanfaatan IT dalam Mengatasi Kekurangan Guru di Kampung	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	950.000.000,00	15	950.000.000,00
1.06 - 28.25		Kajian Pengembangan BBM Alternatif	Terlaksananya Kajian Pengembangan BBM Alternatif	Kab/kota	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	550.000.000,00	5	550.000.000,00
1.06 - 28.26		Studi Pemetaan Potensi Komoditas Unggulan di 5 (lima) Kabupaten Prioritas Provinsi Papua	Tersedianya Peta Potensi Komoditas Unggulan di 5 Kabupaten Prioritas Provinsi Papua	Kabupaten	0	0,00	5	850.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	850.000.000,00
1.06 - 28.27		Kajian Pengembangan Bahan Bakar Nabati Biket Batok Kepala	Terlaksananya Kajian pengembangan Bahan Bakar Nabati Biket Batok Kepala	Buku	0	0,00	0	0,00	50	750.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	750.000.000,00
1.06 - 28.28		Kajian Pengembangan Rumah Mandiri Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya kajian pengembangan Rumah Mandiri Berbasis Sumberdaya Lokal	Dokumen	0	0,00	0	0,00	1	750.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	750.000.000,00
1.06 - 28.30		Fasilitasi Kelembagaan Pusat Inovasi Produk unggulan Papua	Terlaksananya fasilitasi kelembagaan pusat inovasi produk unggulan Papua	persen	0	0,00	100	286.650.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	286.650.000,00
1.06 - 28.31		Pemetaan Kebudayaan Papua Sebagai Panduan Pembangunan Berbasis Budaya Di Provinsi Papua	Sebagai panduan pembangunan berbasis budaya di Provinsi Papua	buku	0	0,00	50	485.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	485.400.000,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
<b>1.06 - 29</b>	<b>Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten.</b>	<b>Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup</b>	<b>Peningkatan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>4.995.725.000,00</b>	<b>100</b>	<b>1.300.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>6.295.725.000,00</b>
1.06 - 29.4		Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Papua	Tersedianya Sumber Daya Air di Provinsi Papua	persen	0	0,00	90	600.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	90	600.000.000,00
1.06 - 29.7		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tersedianya peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	persen	0	0,00	90	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	90	200.000.000,00
1.06 - 29.8		Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tersedianya Data Penyusunan Neraca SDA dan LH	Dokumen	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00
1.06 - 29.9		Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Penurunan Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Tahun 2012-2020	Tersedianya Data Tentang Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Penurunan Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)	laporan	0	0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	400.000.000,00
1.06 - 29.11		Peningkatan Koordinasi Urusan Lingkungan SDA dan Pengairan	Tersedianya Data Hasil Koordinasi Urusan Lingkungan SDA dan Pengairan	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00	29	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	300.000.000,00
1.06 - 29.12		Review Rencana Pengelolaan Bencana Tahun 2011-2015 dan Penyusunan Rencana Pengelolaan	Tersedianya Data Review Rencana Pengelolaan Bencana	kegiatan	0	0,00	0	0,00	1	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	500.000.000,00

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
		Bencana Tahun 2016-2020																
1.06 - 29.17		Penunjang Pelaksanaan Dekonsentrasi	Tertindaknya kegiatan penunjang dekonsentrasi	Buku	0	0,00	10	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	150.000.000,00
1.06 - 29.20		Kajian Daya Dukung Lingkungan	.....	laporan	0	0,00	28	945.725.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	28	945.725.000,00
1.06 - 29.21		Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA)			0	0,00	0	0,00	1	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	300.000.000,00
							<b>64548568000</b>		<b>77943328000</b>		<b>3.5823E+10</b>		<b>33938833413</b>		<b>3.8369E+10</b>		<b>254197736798</b>	

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Rencana Strategis Bappeda Provinsi Papua Tahun 2019-2023 sangat erat kaitannya dengan dokumen RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023, untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPJMD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja Bappeda Provinsi Papua sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPD. Penetapan indikator kinerja Bappeda Provinsi Papua bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2019-2023.

Ukuran kinerja merupakan instrumen pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi bappeda. Selain itu, instrumen tersebut juga akan digunakan sebagai sarana pengendalian dan evaluasi kinerja Bappeda dalam rangka memperbaiki kelemahan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Indikator kinerja dalam dokumen renstra ini menjadi ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja eselon II dan III Bappeda.

Adapun indikator kinerja PD yang telah ditetapkan untuk tiga tahun kedepan adalah sebagai berikut

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Papua yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	Tingkat Konsistensi RKPd terhadap RPJMD	46,39%	80%	80%	85%	90%	95%	100%
	Persentase Program/kegiatan RKPd terhadap Program/kegiatan RPJMD	75%	80%	80%	85%	90%	95%	100%
	Persentase Program dan Kegiatan RKPd terhadap Prgoram dan Kegiatan RKPd	75%	80%	80%	85%	90%	95%	100%
	Pesentasase APBD terhadap kesesuaian Program/kegiatan thd Pola ruang	65%	70%	70%	80%	80%	85%	90%

**Tabel 7.2.**  
**Formulasi dan Elemen Data Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Papua**

No	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Program	Deskripsi Indikator	Formula	Elemen Data
	Ketersediaan Dokumen Perencanaan	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Dokumen RPJPD
		Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Dokumen RPJMD
		Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Dokumen RKPD
		Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Dokumen RTRW
	Persentase Program RPJMD terhadap Program RKPD	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	$\frac{\text{Jumlah Program RKPD Tahun berkenan}}{\text{Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan}} \times 100\%$	Dokumen PRJMD dan RKPD
	Persentase Program dan Kegiatan RKPD terhadap Program dan Kegiatan APBD	Penjabaran Konsistensi Program/Kegiatan RKPD kedalam APBD	$\frac{\text{Jumlah Program APBD Tahun berkenaan sesuai RKPD}}{\text{Jumlah Program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$	Dokumen RKPD dan APBD
	Pesentasase APBD terhadap kesesuaian Program/kegiatan thd Pola ruang	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	$\frac{\text{Kesesuaian prog/keg pembangunan thd pola dan struktur ruang}}{\text{Total Kegiatan dalam APBD}} \times 100\%$	Dokumen RTRW DAN APBD

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan panduan kerja bagi SKPD selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Papua Tahun 2018-2023 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2019, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan Desember 2018, dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2019. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 tersebut adalah program transisi, disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2019 adalah "program sementara" sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk masa jabatan tahun 2018-2023. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam renstra dan RPJMD Provinsi Papua 2013-2018.

Renstra Bappeda Provinsi Papua Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2019 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Papua Tahun 2018-2023 Nomor .. Tahun 2018. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

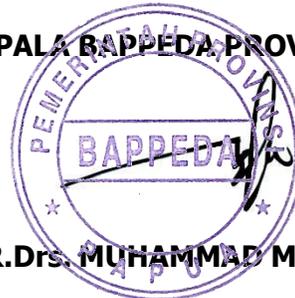
1. Bappeda Provinsi Papua berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Bappeda Tahun 2019-2023 dengan sebaik-baiknya;
2. Bappeda berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Bappeda Tahun 2019-2023, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;

4. Renstra Bappeda Tahun 2013-2018 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019-2023 sesuai dengan tupoksi Bappeda Provinsi Papua.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Bappeda Provinsi Papua untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Papua. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.

Jayapura, 4 Maret 2019

**KEPALA BAPPEDA PROVINSI PAPUA**



**DR.Drs. MUHAMMAD MUSSAD. M.Si**